

SKRIPSI

**MANAJEMEN STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM
MENGATASI MASALAH PENDIDIKAN
DI KABUPATEN GOWA**



Disusun Oleh :

AGUS MAULANA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611129419

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

**MANAJEMEN STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM
MENGATASI MASALAH PENDIDIKAN
DI KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (SAP)

Disusun dan diusulkan oleh

AGUS MAULANA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611129419

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Manajemen Strategi Dinas Pendidikan Dalam
Mengatasi Masalah Pendidikan Di Kabupaten
Gowa

Nama Mahasiswa : Agus Maulana

Nomor Induk Mahasiswa : 105611129419

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan FISIP Unismuh Makassar



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si

NBM : 992 797

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

NBM : 1200038



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0454/FSP/A.4-II/VII/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata I (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Selasa, 29 Juli 2025.

Mengetahui:

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si

NBM : 992 797

Nasrul Han, S.Sos., MPA

NBM: 1067463

Tim Penguji:

1. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

3. Dr. Syukri, S.Sos., M.Si

()
()
()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agus Maulana

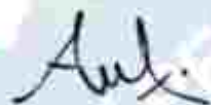
Nomor Induk Mahasiswa : 105611129419

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 November 2024

Yang Menyatakan



Agus Maulana

ABSTRAK

AGUS MAULANA 2025, Manajemen Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Di Kabupateen Gowa. (Fatmawati dan Rudi Hardi)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam mengatasi permasalahan pendidikan, khususnya fenomena anak putus sekolah. Fokus utama penelitian ini adalah pada perumusan strategi, pengamatan lingkungan, pelaksanaan kebijakan, serta pelibatan berbagai pihak terkait dalam mendukung keberlangsungan pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Pendidikan, sekolah, dan pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah menerapkan strategi yang bersifat responsif, seperti pendataan anak putus sekolah secara berkala, pemberian bantuan pendidikan, pembinaan kepada orang tua, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi tersebut dinilai cukup efektif dalam menjangkau dan menekan angka anak putus sekolah, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan, dan terbatasnya sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Pendidikan terus meningkatkan peran unit pelayanan teknis, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga sosial, serta mendorong program pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pendidikan, Anak Putus Sekolah

ABSTRACT

AGUS MAULANA 2025, Strategic Management of the Education Office in Addressing Educational Issues in Gowa Regency. (Fatmawati dan Rudi Hardi)

This study aims to analyze the strategies implemented by the Gowa Regency Education Office in addressing educational problems, particularly the issue of school dropouts. The research focuses on strategy formulation, environmental observation, policy implementation, and the involvement of relevant stakeholders in supporting the continuity of education. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation involving informants from the Education Office, schools, and village governments.

The findings indicate that the Gowa Education Office has adopted responsive strategies such as regular data collection on school dropouts, educational assistance programs, parental guidance, and collaboration with various stakeholders. These strategies have been relatively effective in reducing dropout rates, although several challenges remain, including economic constraints, low awareness of the importance of education, and limited resources. To overcome these obstacles, the Education Office continues to strengthen the role of technical service units, enhance coordination with village governments and social institutions, and promote community outreach and mentoring programs.

Keywords: Strategic Management, Education, School Dropouts

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Manajemen Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Di Kabupateen Gowa”**. Yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan, di antara lembar demi lembar yang tergores ini, sesungguhnya ada cinta yang lebih dahulu dituliskan oleh kedua insan mulia yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan kasih sayang yang tak terukur oleh kata, tak tertakar oleh waktu: Bapak Saddara dan Ibu Satturia, dua nama yang bagi penulis, senantiasa menjadi doa yang tak pernah luput dari langit, dan bumi yang tak pernah letih menopang. Bapak, yang diamnya menyimpan hikmah, yang letihnya disimpan dalam sunyi, namun setiap geraknya adalah doa dalam bentuk paling nyata. Dan Ibu, yang kelembutannya adalah pelabuhan, yang sabarnya adalah pelita saat cahaya tak lagi terasa. Keringat kalian yang jatuh bukan sekadar untuk kehidupan, melainkan untuk harapan. Dalam setiap hela nafas dan keheningan sujud kalian, ada nama penulis yang disampaikan kepada Tuhan, bahkan mungkin lebih sering dari yang penulis

sendiri ingat untuk berdoa. Skripsi ini, meski hanya secuil catatan dari perjalanan ilmiah, penulis persembahkan sepenuh hati untuk Bapak dan Ibu sebagai bukti kecil bahwa cinta kalian tidak sia-sia, bahwa segala letih dan doa yang kalian tanamkan telah tumbuh menjadi langkah yang hari ini bisa berdiri tegak. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kesehatan, umur yang berkah, serta kedamaian dunia dan akhirat kepada Ayah dan Ibu. Dan semoga kelak, setiap huruf dalam karya ini, menjadi amal jariyah yang mengalir untuk kalian berdua—sebagaimana air mata kalian pernah mengalir untuk penulis tanpa pernah meminta imbalan apa pun. Dan untuk saudara-saudari hebat: Hasniah, Diana, Uni, Kiki, dan Inayah terima kasih atas doa, semangat, dan kehadiran yang menenangkan. Kalian adalah versi lembut dari logika yang kadang saya abaikan, yang tidak pernah berhenti mendoakan, senantiasa menjadi sumber motivasi, semangat, dan segala bantuan baik materil maupun waktu untuk kelancaran perkuliahan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, rahmat dan keberkahan.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S IP., M Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S. Sos., M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S. Sos., M. AP selaku Sekretaris

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

4. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing II, yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu memberikan semangat peneliti hingga penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di bangku kuliah.
6. Kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang telah meluangkan waktunya dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia menjadi informan dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada peneliti. Terima kasih telah membantu berlangsungnya penelitian peneliti, semoga semua kebaikan kalian di balas oleh Allah SWT Aamiin.
8. Seperti kata Nietzsche, hidup tanpa teman tongkrongan adalah kesalahan. Maka, terima kasih untuk Anak-Anak Rumah Workshop Bang Karim, Bang Rahmin, Bang Anca (Mura Trans), Bang Agung, Bang Zhul (Wel-Wel), Bang Anshar, Bang Alwi (Bibi), Bang Rais, Bang Daus dan Bang Ahmad kalian bukan hanya teman, tapi sistem pendukung skripsi non-formal yang sangat efektif. Juga untuk teman-teman kampus Nabil, Jhon, Hasby, Ulla, Aghil, Danuarta, Jusdi, Rahmat, Fitrah, Akbar, Jastip, Ubay, Kak Maulana, Kak

Rusli, dan lainnya terima kasih sudah hadir. Tanpa kalian, skripsi ini mungkin selesai lebih cepat, tapi jelas tak sebermakna ini.

9. Di Desa kecil bernama Rappolemba, tempat matahari terbit menyentuh pegunungan dan perkebunan lebih dulu daripada sekolah, saya tumbuh bersama keyakinan sederhana: bahwa pendidikan adalah cahaya pertama yang mampu menembus gelapnya kemiskinan. Tapi waktu berjalan, dan saya menyadari, cahaya itu tak selalu menyala terang di semua tempat. Ada banyak anak yang berlari menuju sekolah tanpa tahu apakah gurunya datang, atau apakah bangku kelasnya masih utuh esok pagi. Skripsi ini lahir dari kegelisahan yang perlahan menjadi kesadaran: bahwa masalah pendidikan bukan hanya soal kekurangan fasilitas atau guru honorer yang tak sejahtera. Ia lebih dalam dari itu. Ia tentang bagaimana negara berpikir, menyusun strategi, dan bertindak. Maka saya memilih untuk mengangkat tema "Manajemen Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Gowa". Sebuah upaya kecil untuk menelisik bagaimana pemerintah daerah, lewat dinas yang diberi mandat besar, menjawab tantangan yang dihadapi di lapangan. Saya menulis bukan hanya sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, tetapi juga sebagai anak desa yang pernah berdiri di depan papan tulis tanpa kapur, pernah belajar tanpa buku pegangan, dan pernah bertanya: apakah ini takdir, atau kesalahan sistem? Sebab seperti yang dikatakan Buya Syafi'i Ma'arif, "Negara harus hadir bukan sebagai penjaga kekuasaan, tetapi pelayan bagi rakyat kecil." Maka jika strategi pendidikan yang dijalankan hanya berhenti pada angka dan

laporan formal, tanpa menyentuh kebutuhan riil di sekolah-sekolah pelosok, kita sedang mengulang kesalahan yang sama membangun gedung tanpa jiwa. Saya juga terinspirasi oleh pemikiran Cak Nur (Nur Cholis Madjid) yang mengingatkan kita tentang pendidikan yang sejatinya merupakan alat pembebasan. "Pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan, tapi upaya memanusiakan manusia." Dalam semangat itu, saya ingin menjadikan skripsi ini bukan hanya kumpulan data dan teori, tetapi juga suara yang mewakili mereka yang selama ini hanya jadi objek kebijakan: siswa yang terpinggirkan, guru yang dilupakan, dan masyarakat yang tak pernah ditanya apa yang mereka butuhkan. Proses penulisan skripsi ini bukan jalan yang lurus. Ada malam-malam panjang penuh keraguan, ada hari-hari lapangan yang tak selalu ramah, ada pertanyaan yang tak mudah dijawab dengan statistik. Namun, setiap kesulitan terasa layak ketika saya mengingat kembali satu hal: bahwa ilmu harus berpihak. Dan keberpihakan itu, dalam konteks ini, adalah pada akses, keadilan, dan keberlangsungan pendidikan untuk semua.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dari semua pihak.

Makassar, 29 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Konsep Dan Teori	13
C. Kerangka Pikir	31
D. Fokus Penelitian	35
E. Deskripsi Fokus	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Informan Penelitian	42
E. Prosedur Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
G. Data Keabsahan	44
H. Tahapan Penelitian dan Jadwal	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Objek Penelitian	46
B. Hasil Penelitian	60
C. Pembahasan	104
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian.....	42
Tabel 3. 2 Tahapan Penelitian dan Jadwal	45
Tabel 4. 1 Singkronisasi PKBM Kecamatan Bontomarannu.....	84
Tabel 4. 2 Singkronisasi PKBM Kecamatan Bontonompo.....	85
Tabel 4. 3 Singkronisasi PKBM Kecamatan Bungaya.....	85
Tabel 4. 4 Singkronisasi PKBM Kecamatan Manuju.....	86
Tabel 4. 5 Singkronisasi PKBM Kecamatan Tinggi Moncong.....	87
Tabel 4. 6 Singkronisasi PKBM Kecamatan Tompobulu.....	87
Tabel 4. 7 Singkronisasi PKBM Kecamatan Somba Opu.....	88
Tabel 4. 8 Singkronisasi PKBM Kecamatan Bontonompo Selatan	88
Tabel 4. 9 Singkronisasi PKBM Kecamatan Pallangga	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Overlay Visualization (Pengumpulan Data Penelitian Melalui Data Vosviewers)	7
Gambar 2 2 Bagan Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Gowa	46
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak konstitusional dan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Komitmen pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak ini tercermin dari alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD. Namun, di tingkat daerah, implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait disparitas akses dan kualitas. Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menjadi contoh nyata di mana dinamika pertumbuhan ekonomi dan budaya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu indikator masalah struktural yang mengemuka adalah tingginya angka anak putus sekolah, yang tidak hanya menghambat pemerataan kesempatan belajar, tetapi juga berpotensi memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi di masa depan.

Secara nasional, angka putus sekolah di Indonesia pada jenjang SMP sederajat mencapai 1,12% dan SMA sederajat 1,48% (BPS, 2022). Namun, di Kabupaten Gowa, persentase ini jauh lebih tinggi. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (2023) menunjukkan bahwa 8,5% anak usia 7-18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang sesuai atau keluar dari sistem sekolah. Angka ini stagnan dalam tiga tahun terakhir, bahkan meningkat di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Parangloe dan Bungaya. Fenomena ini

mencerminkan kegagalan sistem dalam menjamin keberlanjutan pendidikan sekaligus mengindikasikan masalah multidimensi yang melibatkan faktor ekonomi, geografis, sosial-budaya, dan kelembagaan.

Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, di mana 60% anak putus sekolah di Gowa berasal dari keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan (Dinas Sosial Gowa, 2023). Tekanan untuk bekerja membantu keluarga baik di sektor pertanian, nelayan, maupun informal—memaksa anak-anak meninggalkan bangku sekolah. Di Desa Pattalikang, misalnya, banyak anak usia SMP terlibat dalam aktivitas penambangan pasir ilegal untuk menopang ekonomi keluarga. Sementara itu, faktor geografis seperti jarak sekolah yang jauh, minimnya transportasi, dan ketiadaan sekolah menengah di wilayah terpencil memperburuk situasi. Di Desa Tombolo, Kecamatan Parangloe, siswa harus menempuh 10-15 km melalui jalan rusak untuk mencapai SMA terdekat, dengan akses transportasi yang terbatas dan biaya yang memberatkan. Tantangan sosial-budaya juga turut berkontribusi. Praktik pernikahan dini masih terjadi di beberapa komunitas, terutama di wilayah dengan tingkat literasi rendah. Survei Bappeda Gowa (2022) menemukan bahwa 15% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dengan alasan budaya dan ekonomi. Selain itu, persepsi masyarakat tentang urgensi pendidikan menengah yang rendah, terutama bagi anak perempuan, serta stigma terhadap anak berkebutuhan khusus, menjadi penghambat partisipasi pendidikan. Di sisi kelembagaan, keterbatasan kapasitas sekolah seperti kekurangan guru berkualitas, fasilitas belajar tidak memadai, dan

kurangnya program adaptif bagi anak marginal menyebabkan lingkungan belajar tidak menarik bagi peserta didik.

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai leading sector dituntut untuk merancang manajemen strategi yang holistik. Meski telah menjalankan program seperti pemberian beasiswa, pembangunan unit sekolah baru (USB), dan sosialisasi wajib belajar 12 tahun, efektivitasnya masih terbatas. Evaluasi internal Dinas Pendidikan (2023) mengungkap bahwa hanya 40% penerima beasiswa bertahan hingga lulus SMA, sementara 30% USB di daerah terpencil kekurangan guru dan fasilitas pendukung. Masalah utama terletak pada pendekatan yang parsial, seperti kurangnya sinergi dengan dinas terkait (Sosial, Pemberdayaan Perempuan), evaluasi program yang tidak berkelanjutan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Padahal, kompleksitas masalah anak putus sekolah memerlukan intervensi terpadu yang menggabungkan aspek preventif (pencegahan melalui bantuan sosial terpadu), kuratif (penanganan langsung seperti sekolah darurat), dan rehabilitatif (penguatan sistem melalui pendidikan inklusif dan pelatihan keterampilan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen strategi Dinas Pendidikan secara menyeluruh dengan menggabungkan evaluasi kebijakan, pencarian penyebab utama anak putus sekolah, dan rekomendasi berdasarkan fakta lapangan dengan menyatukan data pendidikan, program bantuan sosial, kolaborasi antar-pihak terkait, dan pemanfaatan teknologi. Dengan tujuan agar strategi ini bisa disesuaikan dengan budaya dan kondisi masyarakat.

Hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah daerah membangun sistem pendidikan yang merata, tahan lama, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga, terutama dalam mengatasi angka putus sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai masalah pendidikan terutama pada angka putus sekolah di Kabupaten Gowa, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Dinas Pendidikan berperan penting dalam mengatasi berbagai hambatan yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti letak geografis serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi strategi yang tepat di dalamnya. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Manajemen Strategi yang telah diterapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam menangani masalah anak putus sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami strategi yang digunakan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam mengatasi permasalahan pendidikan di wilayahnya. Secara lebih rinci, sebagai berikut:

Untuk mengetahui Manajemen Strategi yang telah diterapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam menangani masalah anak putus sekolah?

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori terkait strategi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini dapat memperkuat kajian teoritis mengenai peran Dinas Pendidikan dalam masalah pendidikan dengan menyoroti pendekatan-pendekatan strategis yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan mengenai implementasi kebijakan pendidikan, serta mengisi kekosongan literatur tentang pengelolaan pendidikan di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi Dinas Pendidikan dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang program-program yang lebih

sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur pendidikan, pengembangan tenaga pengajar, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang dapat diaplikasikan oleh pemangku kebijakan di tingkat kabupaten atau provinsi untuk mendukung daerah yang mengalami tantangan dalam sektor pendidikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan artikel penelitian yang diperoleh dari hasil pencarian data artikel atau jurnal mengenai Manajemen Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan diperoleh dan diolah dengan menggunakan tiga software bibliometrik, yaitu Publish or Perish (PoP), Mendelay, dan VOSviewer. Artikel-artikel jurnal dikumpulkan melalui PoP, kemudian data disimpan dalam format RIS. Data tersebut selanjutnya dicek menggunakan Mendelay untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi seperti judul, abstrak, dan kata kunci. Setelah memastikan kelengkapan dan kebenaran, data artikel jurnal disimpan kembali dalam format RIS. Langkah terakhir melibatkan penggunaan VOSviewer untuk menghasilkan data mengenai kata kunci dan penulis artikel jurnal Manajemen Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan. Berikut tampilan hasil pengumpulan data melalui VOSviewers.



Gambar 2. 1 Overlay Visualization (Pengumpulan Data Penelitian Melalui Data Vosviewers)

Hasil analisis menggunakan VOSviewer yang didasarkan pada kata kunci Manajemen Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Strategi menunjukkan bahwa tema-tema utama seperti "*manajemen*", "*masalah*", dan "*dinas pendidikan*" sering muncul dalam penelitian sebelumnya. Tema "*manajemen*" terlihat sebagai pusat dari banyak tautan, yang menunjukkan peran pentingnya dalam berbagai diskusi akademis terkait kebijakan pendidikan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sektor pendidikan, khususnya dalam konteks administrasi pemerintahan.

Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara "*dinas pendidikan*", "*strategi*", dan "*masalah pendidikan*". Ini menegaskan bahwa strategi pendidikan dan pengelolaan organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas kebijakan di tingkat dinas pendidikan. Peran kepala dinas pendidikan dan lembaga terkait menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan yang muncul.

Pada analisis kluster, tema-tema yang saling terhubung ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Kluster 1: Tema "*manajemen*" menjadi pusat dari berbagai koneksi, baik dengan "*manajemen pendidikan*" maupun "*manajemen strategi*". Ini menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan sering dikaji dalam konteks strategi dan kebijakan organisasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pendidikan.

Kluster 2: Tema "*dinas pendidikan*" dan "*analisis value*" terhubung erat dengan "*strategi*". Ini menunjukkan bahwa analisis terhadap nilai dan efektivitas

strategi pendidikan menjadi perhatian utama dalam kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh dinas pendidikan.

Klaster 3: Tema "masalah", dan "pendidikan", menunjukkan bahwa pendidikan sering dibahas dalam konteks kebijakan pemerintah dan peran siswa sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan tersebut. Ada perhatian yang besar terhadap bagaimana kebijakan pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas, di mana kepala dinas pendidikan dan lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam menangani permasalahan ini.

Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dan manajemen strategi dalam dinas pendidikan sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem pendidikan. Hubungan antara tema-tema utama ini menegaskan bahwa ada perhatian serius terhadap peningkatan tata kelola pendidikan, dengan strategi yang berfokus pada penguatan peran dinas pendidikan serta pengelolaan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan.

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Morin benjamin, 2018)	Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Di Kota Bitung	Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung yaitu strategi sudah cukup baik dalam menekan angka anak putus sekolah, antara lain : Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menekan angka Anak Putus Sekolah yakni

			berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan Kota Bitung. Pemberian bantuan dana, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, Program BSM (Bantuan Siswa Miskin), Program PIP (Program Indonesia Pintar), Program MaMa CEPAT (Cerdas Peduli Anak Tidak Sekolah), dan Sosialisasi kepada masyarakat.
2.	(Imam Sucahyo et al., 2024)	Strategi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo Dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah	Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa mengenai Kinerja Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dalam Mengatasi Masalah Anak Putus Sekolah dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Probolinggo telah menunjukkan kinerja yang mengarah pada penanggulangan masalah anak putus sekolah. Dinas Pendidikan Kota Probolinggo melakukan intervensi berupa subsidi biaya pendidikan melalui Program Bantuan Operasional Pendidikan dan Program Probolinggo Pintar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan meminimalisir angka putus sekolah.
3.	(Hidayat et al., 2024)	Strategi Sosialisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Pelajar SMP di Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya)	Hasil penelitian menunjukkan objek pada penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi sosialisasi dinas pendidikan dalam mengurangi anak putus sekolah. Paradigma ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain

			deskriptif Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan juga berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat selain itu menjebatani antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi.
4.	(Afriaji & Rahmayanti, 2023)	Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya adanya pengelolaan dana BOS dan penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) di setiap sekolah sebagai upaya dalam mencegah anak putus sekolah, selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat menyelenggarakan Pendidikan untuk anak yang sudah terlanjur putus sekolah. Faktor yang menjadi penghambat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya kurangnya tenaga kerja yang mumpuni dalam mengatasi dan mencegah anak putus sekolah, ditambah penyelenggaraan program pencegahan anak putus sekolah yang belum tepat sasaran.
5.	(Febriyanty, 2021)	Manajemen Strategi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Penanggulangan	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah angka putus sekolah di Karawang paling banyak

		Anak Putus Sekolah di Kabupaten Karawang	berada di daerah pesisir dan rata-rata siswa di Karawang hanya menyentuh kelas 8 SMP. Berbagai macam kebijakan dilakukan oleh Disdikpora demi terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar seperti alokasi beasiswa yang lebih besar dan peningkatan mutu pendidikan, namun hal tersebut belum berjalan optimal karena masih ditemukan indikasi negatif dari pelaksanaan penanggulangan angka putus sekolah di Karawang langkah perbaikan yang dilakukan Disdikpora dengan memberdayakan berbagai pihak untuk membantu dalam pengawasan dan pelaksanaan penanggulangan angka putus sekolah di Karawang.
--	--	--	---

Berdasarkan lima penelitian yang telah dilakukan, upaya penanganan anak putus sekolah memiliki kesamaan dalam keterlibatan pemerintah melalui program bantuan sosial, kebijakan pendidikan, dan pendekatan persuasif untuk memotivasi anak kembali bersekolah, termasuk pendataan, pemberian motivasi, serta penyediaan pendidikan alternatif seperti paket A, B, dan C. Namun, terdapat perbedaan fokus di setiap penelitian, seperti Morin Benjamin (2018) yang menekankan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan bantuan pendidikan, Imam Sucahyo et al. (2024) yang menyoroti subsidi biaya melalui program Bantuan Operasional Pendidikan dan Probolinggo Pintar, serta Hidayat et al. (2024) yang berfokus pada strategi sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Afriaji & Rahmayanti (2023) menyoroti pengelolaan dana BOS, Program Indonesia Pintar, dan pembentukan PKBM, sementara Febriyanty (2021)

menekankan tingginya angka putus sekolah di daerah pesisir Karawang serta perlunya pengawasan ketat dalam implementasi kebijakan. Perbedaan ini mencerminkan variasi strategi dan tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah dalam upaya menekan angka anak putus sekolah.

B. Konsep Dan Teori

1. Konsep Manajemen Strategi

Strategi mengacu pada rencana dan kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, strategi Dinas Pendidikan melibatkan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi pendidikan, menciptakan akses pendidikan yang lebih baik, serta memastikan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Konsep ini berlandaskan pada pemikiran bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung pendidikan, baik melalui kebijakan yang diadopsi secara nasional maupun yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Yuliah, 2020).

Manajemen strategis merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, yang disertai dengan penetapan tentang cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan kemudian diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi guna mencapai tujuannya (Nawawi & Hadari., 2005). Manajemen strategis dikembangkan dalam empat tahap, yakni mulai dari

perencanaan keuangan dasar ke perencanaan berbasis peramalan yang bisa disebut perencanaan strategis menuju manajemen strategis yang berkembang sepenuhnya, termasuk implementasi, evaluasi, dan pengendalian (Mulyasa, 2013).

Dengan pembentukan manajemen strategis, lembaga pendidikan diharapkan mampu bersaing serta meningkatkan mutu layanan pendidikan serta merespon dinamika perubahan. Manajemen strategis adalah suatu keterampilan, teknik, dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai keputusan fungsional organisasi (bisnis dan non bisnis) yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal, yang senantiasa berubah sehingga memberikan kemampuan kepada organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan (Akdon, 2006).

Dengan demikian manajemen strategis merupakan serangkaian tindakan dan keputusan mendasar jangka panjang yang sengaja dibuat oleh manajemen puncak meliputi analisis lingkungan, formulasi, implementasi, evaluasi dan kontrol serta direalisasikan oleh seluruh personel dalam lembaga tersebut. Dalam manajemen strategis sekolah terdapat proses didalamnya yaitu (Tardian, 2019):

1. Perumusan strategi (Strategy Formulation). Perumusan strategi merupakan tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup pengembangan visi dan misi, pengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, penentuan kekuatan dan kelemahan

- internal, menentukan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternative, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.
2. Implementasi strategi (Strategy Implementation). Implementasi strategi adalah proses mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.
 3. Evaluasi strategi (pengawasan). Evaluasi strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil perumusan dan penerapan strategi termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi organisasi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif (Rahadiani & Muslim, 2023). Tahapan penyusunan strategi meliputi:

- 1) Identifikasi masalah: Tahap awal untuk menyusun strategi dengan berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Proses identifikasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan metode brainstorming atau polling pendapat sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada.
- 2) Pengelompokan masalah: Dari tahapan identifikasi masalah di atas akan muncul masalah baru yang beraneka ragam. Maka dari itu untuk mempermudah cara pemecahannya, perlu dilakukannya pengelompokan/pengklasifikasian masalah yang sesuai dengan sifat atau karakter tujuan pengelompokan masalah tersebut.

- 3) Proses abstraksi: Setelah kelompok masalah terbentuk, tahap berikutnya adalah melakukan identifikasi masalah-masalah krusial dari tiap kelompok. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis terhadap masalah tersebut guna mencari faktor penyebab timbulnya masalah. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena faktor-faktor ini akan disusun bersamaan dengan metode pemecahan masalahnya.
- 4) Penentuan cara pemecahan masalah: Setelah tahap abstraksi selesai dilakukan, hal berikutnya yang dilakukan adalah menyelesaikan/memecahkan masalah yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Metode atau cara penyelesaian masalah ini harus konkret dan spesifik.
- 5) Perencanaan untuk implementasi: Tahapan untuk menyusun strategi di atas merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Namun hal terpenting dari semua penyusunan tersebut adalah mengimplementasi seluruh penyusunan strategi yang sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam RPJMN 2023-2024, strategi tersebut mencakup lima aspek utama yang saling mendukung:

- 1) Aspek Politik

Stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi dalam membangun strategi yang berkelanjutan. Pemerintah harus

memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

2) Aspek Ekonomi

Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Aspek ini juga mencakup pengelolaan fiskal yang efektif untuk mendukung prioritas pembangunan.

3) Aspek Sosial

Memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat kesetaraan sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.

4) Aspek Teknologi

Pemanfaatan teknologi menjadi alat penting dalam meningkatkan layanan publik, efisiensi administrasi, dan transparansi melalui inisiatif seperti e-government dan digitalisasi pelayanan.

5) Aspek Lingkungan

Strategi harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, termasuk mitigasi perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, dan transisi ke energi terbarukan.

Menurut Hunger dan Thomas Wheelen., (2003) menjelaskan secara detail dan sistematis kegiatan manajemen strategi yang terdiri dari 4 indikator yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi,

implementasi, dan evaluasi yang secara detail sebagai berikut:

- 1) Pengamatan lingkungan, yaitu tahap dimana perlu menyadari bahwa pemerintah selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perjalanan suatu organisasi atau instansi dipengaruhi oleh suatu peristiwa, perkembangan, dan perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Perubahan tersebut bisa berasal dari luar instansi atau organisasi atau faktor eksternal dan dari dalam instansi atau organisasi atau faktor internal.
- 2) Perumusan strategi, yaitu tahap pengambilan keputusan mengenai alternatif strategi yang akan dipilih oleh pemerintah ataupun organisasi. Strategi yang dipilih merupakan hasil dari pengamatan lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya.
- 3) Implementasi strategi, yaitu pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan atau direncanakan.
- 4) Evaluasi dan pengendalian, yaitu proses membandingkan kinerja dan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan.

Menurut Bryson, (2018) dalam bukunya terkait dengan Strategi dibangun berdasarkan unsur-unsur berikut:

- 1) Visi dan Misi
 - Visi adalah gambaran jangka panjang mengenai strategi

apa yang akan digunakan oleh pemerintah

- Misi adalah langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut.

2) Kebijakan Publik

Kebijakan menjadi landasan strategis yang diterjemahkan dalam peraturan atau panduan implementasi.

3) Program dan Kegiatan

Program adalah implementasi konkret dari kebijakan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, atau bantuan sosial.

4) Sumber Daya

Strategi bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan alam yang efektif untuk mendukung pelaksanaan program.

5) Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi, sementara monitoring dilakukan untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana.

Sebuah strategi yang efektif memerlukan keterlibatan dan kepemilikan yang luas, namun strategi tersebut juga harus dipimpin dari tingkat yang paling atas. Strategi pemerintahan juga bagian dari penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik secara sistematis dari badan-badan publik untuk mencapai barang publik.

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Suwarsono (2013), indikator strategi diuraikan menjadi 5, yaitu:

- 1) Tujuan (purposes), dapat diartikan sebagai sebuah tujuan membutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut.
- 2) Lingkungan (environment), indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari sebuah perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar (changes in ambient conditions) dan perubahan pada kesehatan manusia (change of human health).
- 3) Pengarahan (directions), yaitu usaha untuk menggerakkan anggota- anggota atau organisasi hingga berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran tersebut. Bagian dari pengarahan yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi, dan perintah.
- 4) Aksi (action), yaitu dilihat dari situasi eksternal (luarnya), perangkat yang digunakan dan pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan melakukan sebuah tindakan.
- 5) Belajar (learning), pada bagian ini menggunakan metode perbandingan dan identifikasi.

Menurut Josef Mario Monteiro ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh pemerintah atau organisasi guna menyebarluaskan peraturan atau kebijakan agar lebih efektif dan menyuluruh kepada seluruh masyarakat di wilayahnya. Tahapan manajemen strategi menurutnya mencakup 5 bagian, yaitu:

- 1) Analisis lingkungan: Mengidentifikasi peluang (opportunity) yang harus segera mendapatkan perhatian dan menentukan

beberapa kendala ancaman (threats) yang perlu diantisipasi.

- 2) Penetapan misi dan tujuan: Sebuah organisasi pasti memiliki misi dan tujuan. Misi adalah suatu tujuan yang unik yang membedakannya dengan organisasi-organisasi lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya, sedangkan tujuan adalah landasan utama untuk mengarahkan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 3) Perumusan strategi: Sejumlah tindakan yang terkoordinasi untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing agar memberikan hasil yang maksimal.
- 4) Penerapan (implementasi) strategi: Tindakan pengelolaan macam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya organisasi melalui strategi yang dipilih. Implementasi diperlukan untuk merinci secara lebih jelas bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil dapat direalisasikan.
- 5) Evaluasi dan pengendalian: Evaluasi merupakan suatu tahap untuk menjamin bahwa strategi yang telah dipilih itu terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi adalah proses membandingkan antara hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan. Pengendalian strategi

merupakan pengendalian yang mengikuti strategi yang sedang diimplementasikan, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi strategi meliputi kegiatan memonitor seluruh hasil dari pembuatan strategi dan penerapan strategi, termasuk dalam mengukur kinerja individu atau organisasi dan instansi serta bagaimana mengambil langkah-langkah perbaikan apabila diperlukan.

2. Masalah Pendidikan

Masalah pendidikan merupakan tantangan yang muncul dalam dunia pendidikan dan dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Djumhur & Surya, (1985), masalah pendidikan adalah segala bentuk hambatan yang memengaruhi proses pendidikan, baik dari segi peserta didik, pendidik, maupun lingkungan belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Mudyahardjo, (2001) yang menekankan bahwa masalah pendidikan terjadi ketika ada kondisi yang menyebabkan sistem pendidikan tidak mampu mencapai hasil yang diharapkan. Sementara itu, Sudjana, (2000) menyoroti bahwa masalah pendidikan muncul akibat kesenjangan antara kondisi ideal pendidikan dan kenyataan di lapangan, sehingga menuntut solusi yang tepat agar pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, masalah pendidikan juga berkaitan dengan faktor

eksternal yang memengaruhi keberhasilan pendidikan. Menurut Tilaar (2004), faktor-faktor seperti kurikulum yang tidak relevan, sarana prasarana yang minim, hingga lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat menjadi penyebab utama masalah pendidikan. Pandangan ini diperkuat oleh Soedijarto (1993) yang menjelaskan bahwa masalah pendidikan muncul ketika kebutuhan pendidikan tidak selaras dengan sumber daya yang tersedia, sehingga menuntut kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Dengan demikian, penanganan masalah pendidikan harus mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal agar pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal.

Masalah pendidikan, terutama terkait anak putus sekolah, merupakan kondisi di mana individu tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena berbagai hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghambat akses serta partisipasi mereka dalam sistem pendidikan formal (UNESCO, 2015). Rumberger (2001) menjelaskan bahwa masalah ini terjadi ketika siswa keluar dari sekolah sebelum memperoleh ijazah akibat faktor internal, seperti motivasi dan prestasi akademik, maupun faktor eksternal, seperti kondisi keluarga dan kebijakan sekolah. Coleman (1988) menambahkan bahwa kurangnya modal sosial dalam keluarga dan komunitas berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah, karena anak tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk melanjutkan pendidikan.

Sementara itu, Bourdieu & Passeron (1977) menyoroti bahwa

masalah pendidikan juga merupakan akibat dari ketimpangan sosial, di mana anak dari keluarga ekonomi rendah lebih rentan putus sekolah akibat keterbatasan modal ekonomi, sosial, dan budaya. World Bank (2018) menegaskan bahwa kegagalan sistem pendidikan dalam menyediakan akses yang merata dan berkualitas semakin memperburuk angka putus sekolah, terutama di kalangan kelompok masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, masalah pendidikan ini memerlukan solusi multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan pendidikan.

Menurut faktor-faktor penyebab anak putus sekolah menurut Slameto (2010):

1. Faktor Internal

a. Kondisi fisik dan mental yang kurang baik

Anak yang sering sakit, lemah secara fisik, atau mengalami gangguan mental cenderung sulit mengikuti pelajaran, sehingga berisiko putus sekolah.

b. Rendahnya motivasi belajar

Anak yang kurang termotivasi cenderung malas belajar, tidak bersemangat mengikuti kegiatan sekolah, dan akhirnya memilih berhenti.

c. Kesulitan dalam memahami pelajaran

Jika anak mengalami kesulitan dalam memahami materi, mereka bisa merasa frustrasi dan kehilangan minat untuk

melanjutkan sekolah.

2. Faktor Eksternal

a. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah

Keluarga dengan keterbatasan finansial sering kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi, yang dapat membuat anak terpaksa berhenti sekolah.

b. Lingkungan keluarga yang kurang mendukung

Orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan anak atau adanya konflik dalam keluarga bisa membuat anak merasa tidak termotivasi untuk bersekolah.

c. Pergaulan yang negatif

Lingkungan sosial yang dipenuhi dengan perilaku negatif, seperti kenakalan remaja atau pengaruh teman yang tidak mendukung pendidikan, bisa mendorong anak untuk berhenti sekolah.

d. Kondisi sekolah yang tidak kondusif

Sekolah dengan fasilitas yang terbatas, metode pembelajaran yang membosankan, atau guru yang kurang perhatian dapat membuat anak merasa tidak nyaman sehingga memilih keluar dari sekolah.

Sedangkan menurut Nasution (2000) menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab anak putus sekolah dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Faktor Internal: Kelelahan karena pekerjaan rumah tangga, kurangnya motivasi, dan masalah pribadi.
2. Faktor Eksternal: Tekanan dari keluarga untuk bekerja, lingkungan pergaulan yang buruk, serta kondisi sekolah yang tidak nyaman.

Bourdieu & Passeron (1977) menyatakan bahwa anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah lebih rentan mengalami putus sekolah.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Modal Ekonomi, Keluarga miskin sering kali tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan seperti buku, seragam, transportasi, atau biaya tambahan lainnya.
2. Modal Sosial, Anak dari keluarga kurang mampu sering memiliki jaringan sosial yang terbatas dalam dunia pendidikan, sehingga sulit mendapatkan dukungan untuk melanjutkan sekolah.
3. Modal Budaya, Kurangnya wawasan dan kebiasaan akademik dalam keluarga menyebabkan anak kurang mendapatkan dorongan untuk terus bersekolah.

Dengan kata lain, pendidikan cenderung mereproduksi ketimpangan sosial yang sudah ada, sehingga anak dari keluarga miskin lebih mungkin untuk putus sekolah dibandingkan anak dari keluarga mampu.

Coleman (1988) juga mengemukakan terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi masalah pendidikan terutama pada anak putus sekolah, diantaranya:

1. Dukungan Sosial: Coleman menekankan bahwa dukungan dari

keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran krusial. Ketika lingkungan keluarga atau komunitas kurang mendukung pendidikan misalnya, minimnya perhatian atau bimbingan dalam studi anak cenderung kehilangan motivasi untuk terus bersekolah.

2. Modal Sosial: Jaringan sosial yang terbatas dapat menghambat akses informasi dan sumber daya pendidikan, sehingga meningkatkan kemungkinan anak untuk putus sekolah.

3. Teori Partisipasi Komunitas/masyarakat

Partisipasi komunitas atau masyarakat lokal adalah salah satu faktor kunci keberhasilan program-program pendidikan di desa. Konsep ini mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan pendidikan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan moral, material, hingga keterlibatan dalam pengawasan program Pendidikan (Asnuryati, 2023).

Partisipasi telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu partisipasi dan masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "participate" yang artinya mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian. Sedangkan masyarakat (society) diartikan sebagai orang-orang yang hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, memiliki aturan yang jelas, dan menghasilkan kebudayaan.

Menurut Isband (2007), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan serta pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi permasalahan yang terjadi. Sejalan dengan itu menurut Holil (1980), terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam (Udhiya et al., 2024) adalah proses di mana individu atau kelompok terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan yang berdampak pada kehidupan mereka atau komunitas. Partisipasi masyarakat terbagi dalam empat jenis kegiatan:

- 1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan organisasi untuk memberikan kesempatan mengungkapkan pandangan mereka dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan. Penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dalam menginformasikan kebutuhan

dan kemajuan program pemberdayaan.

- 2) Partisipasi dalam Implementasi: Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program sesuai perencanaan untuk mencapai tujuan bersama. Namun, pelaksanaan program pemberdayaan pertanian terkendala oleh kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan minimnya pelatihan.
- 3) Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat: Masyarakat diharapkan memperoleh manfaat dari pembangunan yang dapat memotivasi mereka untuk berpartisipasi lebih lanjut. Meskipun sebagian masyarakat menikmati manfaat dari pemberdayaan pertanian, kurangnya komitmen dan koordinasi menjadi hambatan dalam pengembangan usaha pasca pelatihan.
- 4) Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi: Evaluasi hasil pemberdayaan bertujuan untuk menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan perencanaan program selanjutnya. Pemerintah desa berupaya membina masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperluas pemasaran hasil pemberdayaan.

Kemudian Holil (1980), membagi bentuk partisipasi ke dalam lima macam, yaitu:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.

2. Partisipasi dalam bentuk iuran.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Selain dua pendapat di atas, Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi lebih rinci, dengan membagi partisipasi menjadi empat jenis, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif yang melibatkan masyarakat, terutama dalam gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini, masyarakat berhak ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud partisipasi ini antara lain kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, serta tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi pergerakan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat berkaitan dengan hasil pelaksanaan program yang telah dicapai, baik dari segi kuantitas

maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan program.

4. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Partisipasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan konteksnya, yaitu bentuk partisipasi nyata (memiliki wujud) dan bentuk partisipasi tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi nyata mencakup uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan. Sementara itu, partisipasi yang tidak nyata meliputi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi evaluasi dalam sebuah program. Partisipasi masyarakat harus terus dilakukan karena beragam masalah akan terus muncul dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun sudah ada upaya untuk mendorong partisipasi, seperti melalui pemilihan umum, diskusi publik, dan mekanisme konsultasi, tingkat partisipasi tersebut masih terhambat oleh sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat pendidikan di beberapa

komunitas, terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan, dan perbedaan budaya partisipasi di berbagai wilayah (Nelly, 2024).

Faktor pendidikan berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat (Haldane et al., 2019). Daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki partisipasi yang lebih aktif, sedangkan di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, partisipasinya mungkin lebih terbatas. Selain itu, kesenjangan akses informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan juga dapat menjadi kendala. Beberapa daerah mungkin menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap sumber informasi yang relevan, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif. Selain itu, perbedaan budaya partisipasi antar wilayah juga berperan dalam mempengaruhi tingkat dan jenis partisipasi masyarakat.

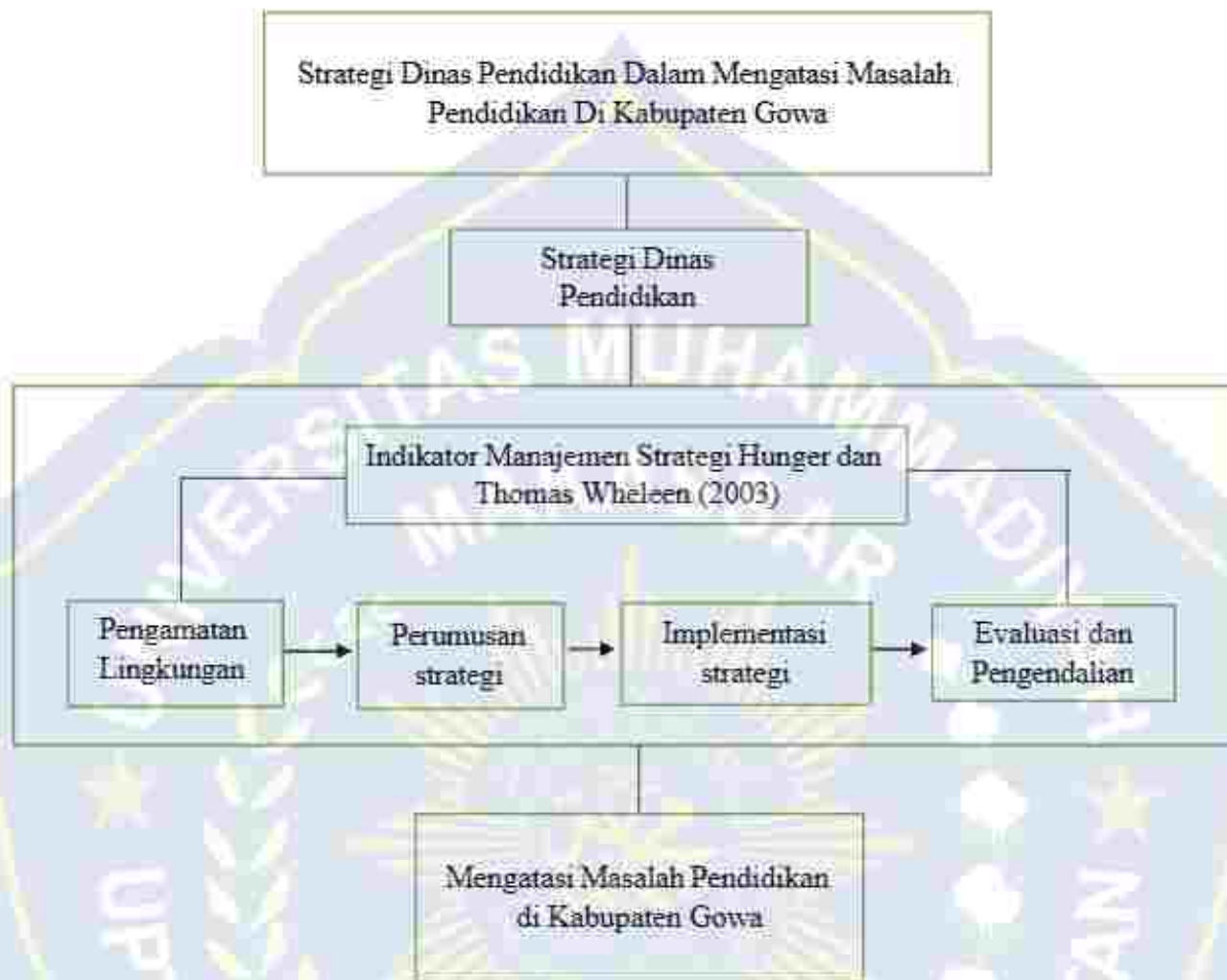
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai pedoman untuk memahami bagaimana manajemen strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam mengatasi permasalahan khususnya terkait anak putus sekolah dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Berdasarkan analisis kondisi lapangan, permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya angka anak putus sekolah, terutama di wilayah pedesaan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kondisi ini meliputi kesulitan ekonomi, aksesibilitas sekolah yang terbatas, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta kurangnya dukungan program yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, yang terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu pencegahan anak putus sekolah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi pencegahan anak putus sekolah melibatkan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembangunan unit sekolah baru di daerah terpencil, serta penyediaan program pendidikan alternatif bagi anak yang sudah putus sekolah. Sementara itu, strategi peningkatan partisipasi masyarakat mencakup sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, pemberdayaan komunitas melalui pendidikan nonformal, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pendidikan.

Kerangka pikir ini menegaskan bahwa melalui strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat terjadi penurunan angka putus sekolah serta peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif guna memperkuat sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Gowa. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangkaberpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 2 Bagan Kerangka Pikir

Gambar kerangka pikir di atas menjelaskan alur penelitian yang diawali dengan identifikasi masalah pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Strategi pemerintah yang teridentifikasi yang dimulai dengan melakukan pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan yang terakhir melakukan evaluasi serta pengendalian.

Proses strategi pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Gowa dapat dijelaskan melalui empat tahapan utama, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi,

dan evaluasi serta pengendalian. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan merupakan tahap awal dalam proses strategi, di mana pemerintah melakukan analisis terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kebijakan pendidikan. Ini meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, serta perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi sistem pendidikan di suatu wilayah. Analisis ini penting untuk memahami tantangan dan peluang yang ada dalam pelaksanaan pendidikan.

2. Perumusan Strategi

Pada tahap ini, berdasarkan hasil pengamatan lingkungan, pemerintah merumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Proses ini melibatkan penyusunan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, menentukan prioritas kebijakan, serta merancang langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik. Pada tahap ini, pemerintah desa atau instansi terkait melaksanakan program-

program pendidikan yang telah direncanakan, termasuk penyediaan fasilitas, pelatihan guru, peningkatan akses pendidikan, dan pemberian bantuan sosial yang mendukung. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada koordinasi, sumber daya, serta komitmen pemerintah dan masyarakat.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian dilakukan untuk menilai sejauh mana strategi yang telah diterapkan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memantau hasil dan dampak dari kebijakan pendidikan. Pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi tetap sesuai dengan rencana dan mengatasi kendala atau masalah yang muncul selama pelaksanaan. Jika diperlukan, strategi yang ada dapat disesuaikan agar lebih efektif.

Implementasi dari strategi-strategi tersebut diharapkan akan membawa hasil yang signifikan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Gowa. Dengan adanya pengembangan infrastruktur yang memadai, fasilitas belajar yang lebih baik, serta dukungan dari masyarakat, proses pembelajaran ini dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada upaya Dinas Pendidikan dalam mengatasi permasalahan yang menghambat akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Gowa. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis strategi-strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan melalui pendekatan sistematis, dimulai dari pengamatan lingkungan untuk memahami kondisi faktual pendidikan di Kabupaten Gowa, perumusan masalah berdasarkan temuan awal, implementasi strategi melalui kebijakan dan program yang konkret, hingga evaluasi dan pengendalian untuk memastikan keberlanjutan hasil yang dicapai.

Dalam kerangka ini, penelitian akan menggali lebih dalam bagaimana kebijakan dan program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan memengaruhi perbaikan sektor pendidikan. Penelitian juga berfokus pada evaluasi efektivitas langkah-langkah strategis yang telah diterapkan, seperti pembangunan sekolah, perbaikan fasilitas belajar, penyediaan alat bantu pendidikan, serta inisiatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal.

Fokus penelitian ini mengarah pada tiga aspek utama:

1. Strategi Dinas Pendidikan

Bagaimana Strategi Dinas Pendidikan mengatasi masalah pendidikan yang ada, dan sejauh mana upaya ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

2. Anak Putus Sekolah

Fokus ini mengeksplorasi masalah anak putus sekolah di Kabupaten Gowa, serta langkah-langkah yang diambil Dinas Pendidikan untuk meminimalisir anak putus sekolah.

3. Partisipasi Masyarakat

Melihat bagaimana peran masyarakat dalam mendukung pendidikan baik dari segi moral, material, maupun keterlibatan langsung dalam berbagai program pendidikan.

Dengan fokus pada ketiga aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi di Kabupaten Gowa dalam sektor pendidikan serta langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mengatasinya terutama dalam hal anak putus sekolah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang aplikatif bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam meminimalisir masalah pendidikan di masa mendatang.

E. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merancang sebuah penelitian. Fokus penelitian merujuk pada batasan atau area spesifik dari suatu masalah atau fenomena yang ingin dijelajahi dan dijawab oleh peneliti. Fokus ini berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun kerangka penelitian, metode, serta tujuan yang ingin dicapai.

Dalam konteks penelitian ilmiah, fokus penelitian harus jelas dan terarah agar proses penelitian dapat berjalan dengan sistematis dan efektif. Fokus penelitian yang terlalu luas dapat menyebabkan penelitian menjadi tidak terarah, sementara fokus yang terlalu sempit mungkin tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penting bagi seorang peneliti untuk merumuskan fokus yang tepat, yang mencakup aspek-aspek penting dari masalah yang sedang diteliti tanpa menyimpang dari tujuan utama penelitian.

Pada penelitian yang sedang dibahas mengenai "Manajemen Strategi Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Gowa", fokus penelitian ini diarahkan pada upaya Dinas Pendidikan dalam menghadapi permasalahan yang menghambat akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Ada tiga aspek utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Strategi Dinas Pendidikan

Strategi Dinas Pendidikan, yang bertujuan untuk menganalisis berbagai kebijakan dan program yang telah diterapkan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas strategi tersebut, termasuk pemberian beasiswa, pembangunan sekolah baru, serta program pendukung lainnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

2. Masalah pendidikan anak putus sekolah

Anak Putus Sekolah, yang mengeksplorasi faktor penyebab tingginya

angka putus sekolah di Kabupaten Gowa serta mengkaji berbagai langkah intervensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi oleh anak-anak dalam menyelesaikan pendidikan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun geografis.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Fokus ini melihat sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam mendukung program pendidikan. Keterlibatan masyarakat, baik dalam bentuk dukungan moral, material, maupun partisipasi langsung, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program pendidikan.

Dengan fokus pada ketiga aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan-tantangan pendidikan yang dihadapi oleh Kabupaten Gowa serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui pendekatan sistematis, dimulai dari pengamatan lingkungan, perumusan masalah, implementasi strategi hingga evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Definisi fokus penelitian yang jelas dan terarah ini juga diharapkan dapat membantu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pengambil kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Lokasi penelitian berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Gowa menghadapi permasalahan signifikan dalam sektor pendidikan, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidik berkualitas, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Secara geografis Kabupaten Gowa, banyak daerah yang terletak di wilayah pegunungan dengan akses yang cukup sulit, ditandai dengan kondisi jalan yang belum memadai dan jarak yang jauh dari pusat kecamatan. Karakteristik lokasi dan kondisi geografis yang menantang menjadikan peneliti tertarik dan relevan untuk dijadikan objek penelitian, khususnya dalam mengkaji Manajemen Strategi dalam mengatasi masalah pendidikan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam konteks

pendidikan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diperdagangkan. Sejalan dengan itu menurut Sugiono (2017) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung memakai analisis yang berbagai macam dalam mengumpulkan data atau informasi yang dapat memberikan gambaran yang luas terhadap sebuah fenomena yang terjadi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap satu objek tertentu, yaitu Dinas Pendidikan. Melalui kajian kasus, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif berbagai aspek yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Kabupaten tersebut, termasuk kebijakan pemerintah, peran tenaga pendidik, dan partisipasi masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Dinas, Pegawai Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat yang terlibat dalam sektor pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Teknik snowball sampling digunakan

untuk menentukan informan, dimana peneliti memulai wawancara dengan tokoh-tokoh utama dan memperluas jaringan informan berdasarkan rekomendasi mereka.

2. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, serta data pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Sumber data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan pendidikan dan upaya penyelesaiannya.

D. Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, informan memainkan peran penting sebagai sumber utama dalam pengumpulan data, terutama pada penelitian kualitatif. Informan adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, yang berfokus pada "Manajemen Strategi Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Gowa," pemilihan informan dilakukan secara selektif dan strategis untuk memastikan data yang diperoleh relevan, mendalam, dan representatif terhadap kondisi nyata di lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peran mereka dalam sektor pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1
2.	Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal	1
3.	Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	1
4.	Masyarakat/Orang Tua	3

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut.

1. Wawancara mendalam (in depth interview), dilakukan terhadap informan kunci seperti Kepala Dinas dan Tokoh Masyarakat.
2. Observasi partisipatif, dimana peneliti mengamati secara langsung salah satu kondisi sekolah, infrastruktur pendidikan, serta proses belajar mengajar di Kabupaten Gowa.
3. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi seperti file laporan, dokumen perencanaan pendidikan, dan laporan pelaksanaan program pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

Data dari hasil wawancara dan observasi dicatat secara rinci dalam catatan lapangan dan direkam menggunakan perangkat digital. Dokumentasi juga dilakukan melalui foto-foto kondisi fisik infrastruktur sekolah dan lingkungan sekitar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama yaitu

1. Reduksi data , yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan akan diabaikan, sementara data yang mendukung fokus penelitian akan dipertahankan.
2. Penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk naratif, tabel, atau grafik untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan , yaitu proses interpretasi dari data yang telah disajikan, dengan fokus pada strategi pemerintah desa dalam mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Gowa.

G. Data Keabsahan

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa teknik:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen.
2. Perpanjangan waktu pengamatan , di mana peneliti berada di lapangan dalam waktu yang cukup lama untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan data.
3. Member check, dilakukan dengan meminta konfirmasi dari informan mengenai hasil wawancara dan observasi untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan.

Selain itu, peneliti juga memperhatikan transferabilitas (apakah hasil

penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain), ketergantungan (konsistensi dalam proses pengumpulan data), dan konfirmasi (keobjektifan data yang dikumpulkan) untuk menjaga validitas penelitian.

H. Tahapan Penelitian dan Jadwal

Tahapan penelitian ini mencakup beberapa langkah yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Tahapan Penelitian dan Jadwal

No.	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan
1	Usulan penyusun	Minggu 1-3
2	Pengumpulan data lapangan	Minggu 4-6
3	Analisis data	Minggu 7-8
4	Penyusunan laporan penelitian	Minggu 9
5	Penyelesaian dan revisi laporan akhir	Minggu 10

Jadwal ini dirancang untuk memastikan penelitian dapat diselesaikan tepat waktu dengan setiap tahapan yang terstruktur secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Gowa

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini

berada pada $12^{\circ}38.16'$ Bujur Timur dari Jakarta dan $5^{\circ}33.6'$ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara $12^{\circ}33.19'$ hingga $13^{\circ}15.17'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}5'$ hingga $5^{\circ}34.7'$ Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Topografi Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, maka wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Kabupaten Gowa berada pada $12^{\circ} 38.16'$ Bujur Timur dari Jakarta dan $5^{\circ} 33.6'$ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara $12^{\circ} 33.19'$ hingga $13^{\circ} 15.17'$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 5'$ hingga $5^{\circ} 34.7'$ Lintang Selatan dari Jakarta.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74%

berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

2. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Gowa di bidang pendidikan. Pada era Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota memiliki otonomi yang luas yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, Kabupaten Gowa secara efektif telah melaksanakan otonomi daerah dengan melakukan penataan kelembagaan atau pembentukan Lembaga Perangkat daerah termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

Dinas Kabupaten Gowa terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten gowa Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Gowa. Penguatan tata kelola yang baik dalam birokrasi pemerintahan merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Lemahnya pelaksanaan pemerintahan menyebabkan layanan pendidikan belum dapat dilaksanakan secara merata, bermutu, berkeadilan, dan akuntabel. Fungsi perencanaan,

monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, dan ketenagaan serta dukungan infrastruktur secara umum turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Visi dan Misi

1. Visi

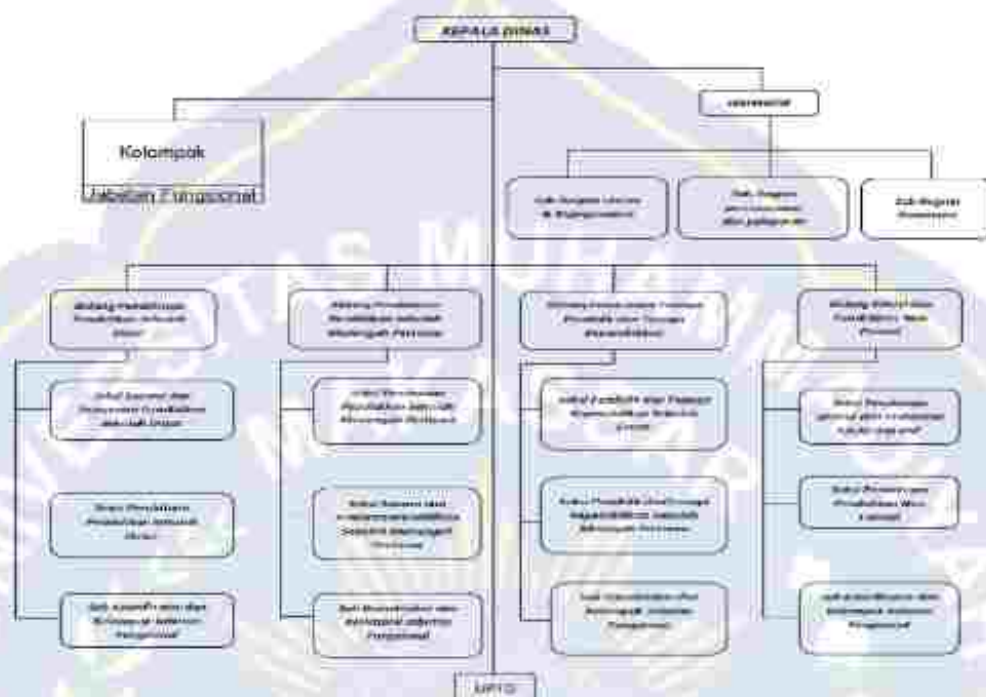
Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

2. Misi

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif (RPJMD 2021-2026)

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menentukan bagaimana tugas-tugas, tanggung jawab, dan otoritas didistribusikan di dalam suatu organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.)



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

4. Data Pegawai

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
1	Taufiq Mursad, St 197207011998031008	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
2	Hj. Rike Susanti Baharuddin, ST 196807311998032002	Pembina Tk.I IV/b	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
3	Muh. Nur Yadin H, S.ST.,M.Si 198610022010011015	Penata Tk.I III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Baharuddin, S.Sos, M.Si 197103101991121001	Pembina IV/a	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	Sabri, Se 197001081988121000	Penata Tk.I III/d	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Asri Indarwani Achmad, S.Pd. 197904102014122002	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Sub Bagian Umum

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
7	Faisal Sahabu 197904232012121003	Pengatur Muda II/b	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Dewi Rahmawaty, Se., M.Si 196704061991022002	Pembina IV/a	Ka. Sub Bagian Keuangan
9	Nursalam, S.Pd 198607292010011011	Penata III/c	Bendahara Pengeluaran
10	A. Farid, Se 197305152010011000	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Sub Bagian Keuangan
11	A. Amrin, Se 197804122010011015	Penata III/c	Staf Sub Bagian Keuangan
12	Kartini, S.Sos, M.Si 197404061993032005	Pembina IV/a	Staf Sub Bagian Keuangan
13	Nursyamsi Sadra, Se 197905212000012013	Penata III/c	Analisis Laporan Keuangan
14	Sri Kartini Ismail, Sp 198611112010012038	Penata III/c	Penyusun Laporan Keuangan
15	Noer Wahida, S.Sos 198201312006042016	Penata Tk.I III/d	Ka. Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan
16	Dr. Ulfa Tenri Batari, S.Pd., MPd 198606052006042001	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
17	Hj. Andi Maryam Hafid, S.Sos 197502021993112001	Penata Tk.I III/d	Jafung Widyaprada Ahli Muda
18	Nurul Marsita, S.Si., Mm 198805102011012022	Penata III/c	Ka. Seksi Sarana dan Prasarana SD
19	Muslimin Yusuf, S.Sos., M.Si 197011221993031008	Penata Tk.I III/d	Ka. Seksi Pendataan Pendidikan SD
20	Hamrinah, Se 197806092007012019	Penata Tk.I III/d	Staf Seksi Manajemen Sekolah Dasar
21	Rama Muntu, A.Ma 198310232014071001	Pengatur II/d	Staf Seksi Pendataan Sekolah Dasar
22	Muhammad Rivan Maulana, S.Stp., Mm 199009112010101002	Penata Tk.I III/d	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
23	Andi Citra Kumala Dewi, S.Sos, M.Si 198202232006042020	Penata Tk.I III/d	Ka. Seksi Pendataan Pendidikan SMP

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
24	Lidya Citrasari, S.Si, Mm 198612072011012012	Penata III/c	Ka. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
25	Saharuddin, S.Ap, Mm 197709052008011015	Penata III/c	Staf Seksi Pendataan Pendidikan SMP
26	Hj. Mantasiah, Se 197201072014122001	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Seksi Pendataan Pendidikan SMP
27	Drs. Mulyadi, M.Si 197110051993031011	Pembina IV/a	Kabid Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
28	Nur Ika Ramadani, Se., M.Si 198605242006042002	Penata III/c	Kasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
29	Ahmad Sila, Se., Mm 197408022014071000	Penata Muda Tk.I III/b	Kepala Seksi Bidang PTK Sekolah Dasar
30	Baharuddin, S.Sos 196808081990031011	Penata Tk.I III/d	Staf Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF
31	Harianti, S.Sos., M.Si 198202092006042030	Penata Tk.I III/d	Kabid Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal
32	St. Megawati, S.Pd., M.Pd., Mm 197403282001122002	Pembina IV/a	Ka. Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD & PNF
33	St. Nursyamsi Gani, Sp., Mm 197606252009012002	Penata Tk.I III/d	Jafung Pamong Belajar Ahli Muda
34	Nasir, S.Sos 197508252007011018	Penata III/c	Ka. Seksi Pembinaan PNF
35	Alamsyah, Se 197312101993101002	Penata Tk. I III/d	Staf Seksi Pembinaan PAUD
36	Risnawati Latif, S.Sos 198509282010012040	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD & PNF
37	Muh. Rusdi, S.Pd 97111062008011003	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Seksi Pembinaan PAUD

a. Tugas dan Fungsi Pokok

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Gowa Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, dimana tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan bidang pendidikan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta pembinaan lembaga pendidikan;
- b. Menyusun program dan kegiatan strategis pendidikan berdasarkan visi dan misi daerah;
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh bidang dan seksi di lingkungan Dinas Pendidikan;
- d. Menjalin kerja sama lintas sektor dalam rangka peningkatan mutu dan akses pendidikan.

2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidikan dasar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

(1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program dan kegiatan pendidikan dasar (SD dan SMP);
- b. Pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru pendidikan dasar;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pendidikan

dasar.

(2) Uraian tugas:

- a. Menginventarisasi permasalahan pendidikan dasar dan menyusun alternatif pemecahan.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama dalam peningkatan mutu pembelajaran.
- c. Mendorong pelaksanaan program wajib belajar dan upaya penanggulangan anak putus sekolah.

3. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan kurikulum dan sistem penilaian pendidikan.

(1) Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional dan lokal.
- b. Peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan kurikulum dan penilaian.
- c. Pelaksanaan evaluasi kurikulum.
- d. Penyusunan pedoman penilaian hasil belajar peserta didik.

(2) Uraian tugas:

- a. Mengkaji kebutuhan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kontekstual.
- b. Menyusun perangkat penilaian hasil belajar siswa sesuai jenjang pendidikan.

- c. Memberikan bimbingan teknis kepada sekolah dalam pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pembelajaran.

4. Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan.

(1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.
- b. Pelaksanaan diklat dan pelatihan kompetensi pendidik.
- c. Pendataan dan analisis kebutuhan tenaga pendidikan.
- d. Koordinasi peningkatan profesionalisme guru.

(2) Uraian tugas:

- a. Menyusun strategi distribusi guru secara merata dan proporsional.
- b. Melaksanakan kegiatan sertifikasi, akreditasi, dan penghargaan untuk pendidik.
- c. Membina hubungan kerja sama dengan LPTK dan lembaga pelatihan guru.

5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal

Mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan nonformal dan kesetaraan.

(1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pendidikan kesetaraan dan keterampilan.

- b. Pembinaan terhadap lembaga pendidikan nonformal (PKBM, LKP, dll).
- c. Pelaksanaan kegiatan penyetaraan pendidikan bagi masyarakat.
- d. Evaluasi capaian program pendidikan nonformal.

(2) Uraian tugas:

- a. Menyusun program pendidikan untuk anak putus sekolah dan warga belajar dewasa.
- b. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan nonformal.
- c. Meningkatkan akses layanan pendidikan bagi kelompok marginal dan terpencil.

6. Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan sarana prasarana pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal.

(1) Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendataan lembaga dan peserta didik PAUD dan PNF.
- b. Identifikasi dan pengelolaan kebutuhan sarana-prasarana lembaga.
- c. Penyusunan perencanaan pengadaan dan distribusi fasilitas pendidikan.
- d. Monitoring efektivitas pemanfaatan sarana pendidikan.

(2) Uraian tugas:

- a. Mengelola sistem informasi dan basis data lembaga PAUD dan

PNF.

- b. Menyusun proposal pengadaan sarana berdasarkan kebutuhan riil lembaga.
- c. Berkoordinasi dengan lembaga penerima bantuan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan sarana.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa manajemen strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam menangani permasalahan anak putus sekolah dilakukan secara terarah melalui tahapan yang terstruktur dan berbasis pada analisis kebutuhan daerah. Strategi ini dimulai dari proses pengamatan lingkungan, yang mencakup pemetaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang menjadi penyebab utama terjadinya kasus anak putus sekolah, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan rentan. Hasil dari pengamatan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang sesuai dengan karakteristik permasalahan di masing-masing wilayah.

Perumusan strategi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, tokoh masyarakat, aparat desa, serta staf teknis yang memahami kondisi di lapangan. Program-program strategis yang dirancang antara lain mencakup penyisiran data anak tidak sekolah secara berkala, pemberian beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, penguatan peran satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam mendukung

keberlangsungan pendidikan. Strategi tersebut juga menekankan pentingnya penggunaan data digital dan pemanfaatan sistem informasi untuk mempercepat identifikasi serta penanganan anak-anak yang berisiko putus sekolah.

Dalam tahap implementasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menerapkan pola kerja kolaboratif dengan instansi lain, sekolah, pemerintah desa, dan orang tua siswa untuk memastikan keberhasilan program. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan strategi ini dalam menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, serta kondisi infrastruktur sekolah yang belum memadai di beberapa daerah.

Oleh karena itu, tahap evaluasi dan pengendalian dilakukan secara rutin melalui monitoring kegiatan, analisis capaian target, dan forum evaluatif yang terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap adaptif terhadap dinamika sosial dan pendidikan yang berkembang. Dengan pendekatan manajemen strategi yang komprehensif ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemerataan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan empat indikator utama untuk menilai efektivitas manajemen strategi yang diterapkan, yaitu: pengamatan

lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa Dinas telah menjalankan fungsi strategisnya secara terpadu dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan lokal.

1. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan dalam konteks strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah pendidikan, termasuk fenomena anak putus sekolah. Proses ini mencakup identifikasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan budaya masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi partisipasi dan keberlanjutan pendidikan. Melalui pengamatan yang menyeluruh, Dinas Pendidikan dapat mengenali faktor-faktor penyebab rendahnya akses pendidikan, seperti kemiskinan, keterbatasan sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Informasi dari hasil pengamatan ini menjadi dasar yang kuat bagi penyusunan strategi yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan memahami lingkungan secara mendalam, strategi yang diterapkan dapat lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan di Kabupaten Gowa.

1. 1 Faktor utama penyebab anak-anak putus sekolah di Kabupaten Gowa

Masalah anak putus sekolah merupakan tantangan serius dalam dunia pendidikan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan geografis seperti Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pendidikan serta tokoh masyarakat di Kabupaten Gowa, ditemukan bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penyebab anak-anak mengalami putus sekolah. Faktor-faktor ini muncul dari berbagai latar belakang, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi lingkungan. Identifikasi terhadap faktor-faktor ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang tepat guna menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Gowa akan diuraikan pada bagian berikut berdasarkan hasil temuan lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Gowa berbeda antara wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Di dataran tinggi, penyebab utamanya adalah karena orang tua bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Anak-anak mereka kerap dibawa serta ke tempat kerja sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan di daerah asal. Di dataran rendah, angkaputus sekolah relatif lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah (Perda) yang

mewajibkan pendidikan minimal sampai usia 12 tahun dan adanya program pendidikan gratis. Peraturan ini menjadi dorongan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka." (Hasil wawancara, MA, tanggal 25 April 2025)

Mulyadi menjelaskan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Gowa bervariasi antara wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Di wilayah dataran tinggi, salah satu penyebab utama adalah fenomena migrasi Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang menyebabkan anak-anak mengikuti orang tua mereka ke luar negeri. Anak-anak ini seringkali tidak dapat melanjutkan pendidikan di daerah asal karena harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru di negara tempat orang tua mereka bekerja. Keterbatasan akses pendidikan di luar negeri dan pengaruh sosial budaya di tempat tinggal baru turut memperburuk keadaan ini. Sebaliknya, di dataran rendah, kondisi lebih baik, terutama berkat adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan anak-anak untuk bersekolah hingga usia 12 tahun. Peraturan ini menjadi dorongan yang kuat bagi orang tua untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu, adanya program pendidikan gratis yang digulirkan pemerintah menjadi faktor yang sangat mendorong partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal, sehingga tingkat putus sekolah di wilayah ini relatif lebih rendah.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mengatakan bahwa:

“Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah. Salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak. Selain itu, ada juga faktor ketidakinginan dari anak itu sendiri untuk melanjutkan sekolah, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Faktor geografis juga memiliki pengaruh signifikan, terutama di wilayah Kabupaten Gowa yang memiliki kondisi dataran tinggi dan rendah. Anak-anak yang tinggal di daerah dataran tinggi cenderung lebih rentan putus sekolah, karena keterbatasan sarana, prasarana, dan akses terhadap fasilitas pendidikan.” (Hasil wawancara MW, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa selain faktor ekonomi, yang menjadi salah satu penyebab utama anak-anak putus sekolah adalah rendahnya motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan. Banyak anak yang tidak tertarik atau merasa tidak perlu melanjutkan sekolah setelah menyelesaikan jenjang tertentu, seperti SD atau SMP. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, yang mungkin tidak cukup mendukung untuk mendorong anak-anak tersebut tetap melanjutkan pendidikan. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting, di mana banyak keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama untuk jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Selain itu, faktor geografis juga berpengaruh besar, terutama di daerah dataran tinggi yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.

Di daerah-daerah ini, anak-anak menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas pendidikan yang memadai, baik dari segi jarak, transportasi, maupun ketersediaan sekolah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal mengatakan bahwa:

“Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Gowa. Pertama, banyak anak, khususnya di wilayah pedesaan, yang lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Mereka lebih memilih bercocok tanam, bertani, atau berkebun karena menganggap bisa langsung memperoleh penghasilan tanpa perlu menempuh pendidikan tinggi. Kedua, banyak anak yang memilih untuk menjadi tenaga kerja, terutama setelah lulus SMA. Beberapa dari mereka mengikuti orang tuanya ke luar daerah atau ke luar negeri untuk bekerja. Selain itu, terdapat juga kasus anak yang putus sekolah karena orang tua bercerai, tidak memiliki motivasi untuk sekolah, atau lebih memilih untuk tinggal di tempat lain.” (Hasil wawancara, HA, tanggal 25 April 2025)

Hariyanti menyampaikan bahwa faktor sosial-ekonomi sangat berpengaruh terhadap keputusan anak untuk berhenti sekolah, terutama di wilayah pedesaan. Di banyak desa, anak-anak cenderung lebih memilih untuk bekerja di sektor pertanian, bertani, atau berkebun, karena pekerjaan ini dianggap dapat langsung menghasilkan uang dan lebih berguna untuk membantu perekonomian keluarga. Pendidikan sering kali dianggap sebagai pilihan yang kurang menguntungkan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Selain itu, banyak anak yang melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA dan kemudian memilih untuk bekerja, mengikuti orang tua mereka ke luar daerah atau

bahkan keluar negeri. Tidak jarang, anak-anak juga putus sekolah karena masalah keluarga, seperti perceraian orang tua, atau karena mereka kehilangan motivasi untuk bersekolah. Ada juga kasus di mana anak lebih memilih untuk tinggal di tempat lain, misalnya ikut keluarga lain yang lebih mendukung ekonomi keluarga mereka.

Dalam proses pengamatan lingkungan, salah satu temuan penting yang turut mempengaruhi angka anak putus sekolah di Kabupaten Gowa adalah tingginya kasus pernikahan anak pada usia sekolah. Fenomena ini menjadi bagian dari tantangan sosial yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi dan kesejahteraan rendah. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber resmi, tren kasus dispensasi pernikahan anak menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Tabel berikut menggambarkan jumlah kasus pernikahan anak yang tercatat di Kabupaten Gowa dari tahun 2019 hingga 2023:

No.	Periode	Jumlah Kasus
1.	Oktober 2019	34 kasus
2.	Oktober 2020	70 kasus
3.	Desember 2021	70 kasus
4.	2022 (perkiraan sebelum 2023)	95 kasus (sebelum SOP)
5.	2023 (full tahun)	29 kasus
6.	Jan-Jul 2023	29 kasus

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa:

"Di wilayah pegunungan, anak-anak banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena ikut ibunya yang bekerja ke luar negeri. Karena ikut pindah, mereka jadi tidak bisa terus sekolah di sini." (Hasil wawancara, NR, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara seorang warga dari daerah dataran tinggi, menjelaskan bahwa banyak anak yang berhenti sekolah karena mengikuti ibu mereka yang bekerja ke luar negeri. Ketika anak-anak ikut berpindah tempat, mereka biasanya tidak bisa melanjutkan pendidikan di daerah asal karena terbentur dengan kendala-kendala seperti kurangnya fasilitas pendidikan dan akses yang terbatas. Ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak anak di daerah dataran tinggi yang tidak melanjutkan pendidikan mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa:

"Selain ikut orang tua ke luar negeri, ada juga yang berhenti sekolah karena harus membantu bekerja di rumah atau ladang. Kadang orang tuanya menganggap anak lebih baik membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan sekolah." (Hasil wawancara, AN, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu orang tua bekerja di ladang atau di rumah. Sering kali, orang tua lebih memilih anak untuk membantu pekerjaan rumah atau ladang, yang dianggap dapat memberikan penghasilan langsung bagi keluarga, daripada

melanjutkan pendidikan di sekolah. Dalam pandangan beberapa orang tua, pendidikan formal menjadi kurang prioritas jika dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa:

"Di tempat saya, kadang anak-anak berhenti sekolah karena tidak punya kendaraan ke sekolah. Jaraknya jauh, dan transportasi umum juga tidak selalu tersedia." (Hasil wawancara, MT, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menyoroti masalah akses transportasi sebagai salah satu kendala utama anak-anak untuk melanjutkan pendidikan di daerah dataran tinggi. Banyak anak yang tinggal di daerah yang sangat terpencil dan harus menempuh jarak jauh untuk menuju sekolah. Masalahnya adalah keterbatasan transportasi umum yang tersedia, sehingga anak-anak sering kali kesulitan untuk pergi ke sekolah. Hal ini menambah beban bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi terhambat oleh faktor geografis dan infrastruktur yang tidak memadai.

2. 2 Dinas Pendidikan mengidentifikasi anak-anak yang putus sekolah

Dalam upaya menanggulangi masalah anak putus sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa melakukan langkah awal yang krusial, yaitu proses identifikasi terhadap anak-anak yang tidak lagi melanjutkan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas

Pendidikan juga bekerja sama dengan pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pengawas sekolah untuk menelusuri keberadaan serta latar belakang anak-anak yang putus sekolah. Identifikasi ini mencakup informasi terkait usia, tingkat pendidikan terakhir, penyebab putus sekolah, serta kondisi keluarga. Data yang diperoleh dari hasil identifikasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk perencanaan intervensi dan program pengembalian anak ke bangku pendidikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa:

"Dinas Pendidikan melakukan pengawasan melalui perpanjangan tangan di tingkat kecamatan, yaitu melalui Koordinator Wilayah Kecamatan. Para koordinator ini bertugas memantau kondisi pendidikan di masing-masing kelurahan dan melaporkan jika terdapat anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan." (Hasil wawancara, MA, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang putus sekolah melalui perpanjangan tangan di tingkat kecamatan, yaitu Koordinator Wilayah Kecamatan. Para koordinator ini bertugas untuk memantau kondisi pendidikan di masing-masing kelurahan dan melaporkan jika ada anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat sangat penting untuk mempermudah pendataan dan identifikasi anak-anak

yang putus sekolah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mengatakan bahwa:

"Dinas Pendidikan saat ini menjalankan program "Kembali ke Sekolah", yang bekerja sama dengan Bappeda dan pemerintah desa. Pendataan dilakukan secara kolaboratif untuk mengidentifikasi anak-anak yang putus sekolah maupun yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Anak-anak yang masih memungkinkan untuk kembali ke pendidikan formal akan dimasukkan kembali ke sekolah, sedangkan yang tidak memungkinkan akan diarahkan ke jalur pendidikan nonformal untuk dibina lebih lanjut." (Hasil wawancara, MW, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan juga menjalankan program "Kembali ke Sekolah", yang merupakan inisiatif untuk mengidentifikasi anak-anak yang putus sekolah dengan melibatkan berbagai pihak seperti Bappeda dan pemerintah desa. Pendataan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga bisa lebih akurat dalam mendeteksi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Program ini juga mencakup pemulihan pendidikan untuk anak-anak yang masih memungkinkan untuk kembali ke jalur pendidikan formal, sementara bagi mereka yang sudah terlalu lama putus sekolah, akan diarahkan ke jalur pendidikan nonformal untuk terus diberikan pembinaan dan keterampilan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal

mengatakan bahwa:

"Identifikasi dilakukan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di setiap sekolah. Melalui data ini, Dinas Pendidikan dapat mengetahui siswa yang berhenti sekolah dan melakukan penelusuran lebih lanjut." (Hasil wawancara, HA, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan juga memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memantau siswa yang berhenti sekolah. Data ini sangat penting sebagai dasar dalam melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap anak-anak yang putus sekolah. Melalui Dapodik, Dinas Pendidikan bisa mengetahui dengan lebih pasti jumlah siswa yang tidak lagi terdaftar dan melakukan tindakan yang diperlukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat mengatakan bahwa:

"Biasanya dari kecamatan ada petugas yang aktif memantau. Mereka sering bertanya langsung ke sekolah atau warga sekitar jika ada anak yang berhenti sekolah." (Hasil wawancara, NR, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara masyarakat menyampaikan bahwa di wilayah dataran rendah, petugas kecamatan secara rutin memantau situasi di lapangan. Petugas sering bertanya kepada sekolah atau masyarakat sekitar jika ada anak yang berhenti sekolah, untuk memastikan agar masalah ini segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

"Biasanya informasi datang dari kepala sekolah atau guru yang melihat muridnya tidak masuk terus. Dari situ, petugas

kecamatan turun mengecek ke lapangan atau menanyakan langsung ke keluarga.” (Hasil wawancara, AN, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa informasi terkait anak-anak yang putus sekolah biasanya pertama kali datang dari kepala sekolah atau guru. Jika siswa tidak masuk sekolah dalam waktu yang lama, pihak sekolah akan melaporkan hal ini ke petugas kecamatan untuk ditindaklanjuti dengan mendatangi keluarga dan menanyakan alasan berhenti sekolah.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengamatan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memiliki peran strategis dalam proses perumusan kebijakan dan penyusunan strategi penanggulangan masalah pendidikan, khususnya terkait fenomena anak putus sekolah. Proses pengamatan ini mencakup analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan budaya masyarakat yang berdampak langsung terhadap partisipasi anak dalam pendidikan. Melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari sekolah, masyarakat, serta perangkat desa dan kecamatan, Dinas Pendidikan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyebab anak putus sekolah. Hasil pengamatan ini kemudian menjadi dasar dalam menyusun program dan intervensi yang lebih adaptif dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Meskipun belum dapat disimpulkan secara menyeluruh tingkat keberhasilannya, pendekatan ini

menunjukkan adanya upaya serius dan sistematis dalam memahami kondisi lapangan sebagai pijakan awal perencanaan kebijakan pendidikan.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi nyata pendidikan di daerah, terutama berkaitan dengan masalah anak putus sekolah. Dalam proses ini, Dinas Pendidikan mengidentifikasi akar permasalahan melalui data lapangan, hasil pemantauan, dan masukan dari berbagai pihak seperti sekolah, masyarakat, dan pemerintah desa. Strategi dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, keterbatasan yang ada, serta potensi dukungan dari pihak terkait. Perumusan ini menghasilkan kebijakan yang terarah, seperti pelaksanaan program penyisiran data anak tidak sekolah, pemberian bantuan pendidikan, dan peningkatan peran serta satuan pendidikan dalam mencegah anak putus sekolah. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berorientasi pada solusi jangka panjang agar strategi yang diterapkan dapat menjawab tantangan pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Gowa.

1) Strengths (kekuatan)

Merupakan faktor-faktor internal yang menjadi keunggulan atau kekuatan organisasi. Ini bisa mencakup sumber daya yang dimiliki, keterampilan, pengalaman, dan hal-hal positif yang memberi

keuntungan dibandingkan dengan pesaing atau tantangan yang dihadapi. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung upaya pengentasan masalah pendidikan, terutama anak putus sekolah. Kebijakan pendidikan gratis, keberadaan peraturan daerah yang mewajibkan pendidikan hingga usia 12 tahun, serta program identifikasi anak putus sekolah yang melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, pemerintah desa, dan kecamatan, memberikan dasar yang kuat bagi upaya pemerintah dalam menangani isu ini. Kolaborasi antar lembaga dan pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga menjadi kekuatan penting dalam memantau dan mengatasi masalah pendidikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa:

"Salah satu strategi utama yang telah lama dijalankan adalah program pendidikan gratis. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua dan mendorong mereka agar tetap menyekolahkan anak-anaknya." (Hasil wawancara, MA, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa salah satu strategi utama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menekan angka anak putus sekolah adalah dengan memberlakukan program pendidikan gratis. Melalui program ini, seluruh biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah, sehingga dapat mengurangi

beban finansial orang tua, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Strategi ini terbukti efektif karena mampu menghilangkan salah satu hambatan utama yang menyebabkan anak-anak berhenti sekolah, yaitu ketidakmampuan ekonomi keluarga.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mengatakan bahwa:

"Strategi utama yang digunakan adalah melalui sistem dasbor khusus yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Dasbor ini berfungsi untuk memverifikasi dan memvalidasi data anak yang tidak sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan juga memberikan akses akun kepada pemerintah desa agar dapat melakukan verifikasi data warganya secara langsung. Hasil verifikasi tersebut akan digunakan untuk menentukan apakah anak tersebut akan dikembalikan ke pendidikan formal atau diarahkan ke pendidikan nonformal" (Hasil wawancara, MW, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini mengungkap bahwa strategi lanjutan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah pemanfaatan sistem dasbor digital untuk memetakan anak-anak yang tidak bersekolah. Dasbor ini dilengkapi dengan fitur verifikasi dan validasi data yang dapat diakses oleh pemerintah desa, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan terkait langkah selanjutnya apakah anak tersebut diarahkan kembali ke jalur pendidikan formal atau diberikan alternatif pendidikan melalui jalur nonformal. Pemanfaatan teknologi ini membantu pemerintah dalam melakukan pemetaan yang lebih akurat dan responsif terhadap

kondisi di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal mengatakan bahwa:

"Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menyediakan layanan pendidikan nonformal melalui lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga ini memberikan layanan pendidikan yang setara, seperti Paket A, B, dan C, bagi anak-anak yang tidak bersekolah di jalur formal. Setiap PKBM memiliki tutor yang bertugas menyasar wilayah masing-masing untuk mendata anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah, termasuk mereka yang membutuhkan ijazah untuk keperluan kerja. Misalnya, seorang anak pernah sekolah sampai kelas 2 SMP, maka PKBM akan meminta dokumen seperti rapor untuk menginput data ke Dapodik dan memungkinkan anak tersebut melanjutkan pendidikan nonformal dan mengikuti ujian hanya dalam satu tahun." (Hasil wawancara, HA, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini dijelaskan bahwa salah satu strategi nyata yang dijalankan adalah melalui peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan nonformal. PKBM membuka akses bagi anak-anak yang telah terputus dari pendidikan formal untuk kembali melanjutkan pendidikannya melalui Paket A, B, dan C. Program ini memungkinkan mereka memperoleh ijazah setara SD, SMP, dan SMA. Pendekatan ini dilengkapi dengan keaktifan tutor yang mendata langsung ke lapangan, sehingga program yang diselenggarakan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendengar ada program beasiswa khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Itu juga salah satu cara agar mereka tetap bisa sekolah meski kondisi ekonominya sulit.” (Hasil wawancara, MT, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa selain pendidikan gratis, program beasiswa juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencegah anak putus sekolah. Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa dari keluarga yang sangat membutuhkan, sehingga mereka tetap memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan. Ini menjadi bentuk jaring pengaman sosial yang mampu mempertahankan partisipasi pendidikan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

2) Weaknesses (kelemahan)

Weaknesses adalah faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Kelemahan ini bisa berupa kekurangan sumber daya, keterbatasan keterampilan, atau masalah operasional lainnya yang perlu diperbaiki.

Meskipun strategi-strategi tersebut telah berjalan, terdapat tantangan seperti jumlah PKBM aktif yang masih terbatas, yakni hanya sekitar 22–23 dari total 32. Ini menunjukkan masih adanya keterbatasan jangkauan terhadap seluruh wilayah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal mengatakan bahwa:

“Saat ini terdapat 32 PKBM di Kabupaten Gowa, dengan sekitar 22 hingga 23 yang aktif.” (Hasil wawancara, HA, tanggal 25 April 2025)

Berdasarkan hasil diketahui bahwa di Kabupaten Gowa terdapat sebanyak 32 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di berbagai wilayah. Namun demikian, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 22 hingga 23 PKBM yang dinyatakan aktif menjalankan kegiatan pembelajaran dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 9 hingga 10 PKBM yang tidak aktif atau belum berfungsi secara optimal. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam upaya perluasan akses pendidikan nonformal, terutama bagi warga masyarakat yang putus sekolah atau belum sempat mengenyam pendidikan formal secara tuntas. Ketidakefektifan sebagian PKBM ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan dana operasional, serta minimnya partisipasi masyarakat sekitar.

Selain itu, masih dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas lembaga, khususnya dalam hal pelaksanaan program yang menyentuh hingga tingkat desa. Walaupun banyak pihak dilibatkan, efektivitas koordinasi kadang tidak merata.

3) Opportunities (peluang)

Opportunities merupakan faktor eksternal yang memberikan

kesempatan atau peluang bagi organisasi untuk berkembang. Peluang ini bisa datang dari perubahan pasar, kebijakan pemerintah yang mendukung, atau tren sosial yang mengarah pada peningkatan permintaan atau partisipasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mengatakan bahwa:

"Seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam proses ini, mulai dari pimpinan daerah, Bappeda, dinas pemerintah desa, hingga lembaga internasional seperti UNICEF. Masyarakat juga turut dilibatkan secara aktif, karena proses pendataan dilakukan secara berbasis masyarakat." (Hasil wawancara, MW, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa seluruh pemangku kepentingan turut terlibat dalam perumusan strategi. Ini mencakup pimpinan daerah, Bappeda, dinas pemerintah desa, dan lembaga internasional seperti UNICEF. Dalam proses ini, masyarakat juga sangat aktif terlibat, terutama dalam pendataan yang dilakukan berbasis masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi anak-anak yang putus sekolah dan menyusun program yang tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Tokoh masyarakat seperti imam masjid atau kepala dusun juga dilibatkan. Karena mereka yang tahu langsung kondisiarganya dan bisa memberikan saran yang tepat.” (Hasil wawancara, NR, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa tokoh masyarakat seperti imam masjid dan kepala dusun turut dilibatkan karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat dan dapat memberikan masukan yang relevan untuk perumusan strategi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Dari informasi yang saya tahu, pemerintah juga mengajak organisasi pemuda dan karang taruna dalam perumusan program, agar anak-anak muda juga merasa punya peran.” (Hasil wawancara, AN, tanggal 25 April 2025)

Berbeda dari wawancara dengan masyarakat yang lain, hasil wawancara ini menyampaikan bahwa organisasi pemuda dan karang taruna juga diikutsertakan dalam perumusan program, dengan harapan agar anak muda merasa memiliki peran dalam mengatasi masalah pendidikan di desa mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa:

“Beberapa kebijakan unggulan yang dijalankan di antaranya:

- Program mengaji 30 menit sebelum pembelajaran dimulai bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.
- Program pemberian seragam gratis untuk siswa baru.

- Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk membangun semangat belajar dan menarik minat anak-anak agar tetap bersekolah." (Hasil wawancara, MA, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa keberadaan program-program unggulan seperti mengaji 30 menit sebelum pembelajaran dan pemberian seragam gratis kepada siswa baru merupakan bentuk intervensi langsung yang berdampak pada motivasi belajar anak. Program mengaji, yang diterapkan sejak jenjang TK hingga SMA, tidak hanya menanamkan nilai religius, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter disiplin anak sejak dini. Sementara itu, kebijakan pemberian seragam gratis meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Kedua kebijakan ini secara umum dirancang untuk menarik minat anak agar tetap bersekolah dan merasa diperhatikan oleh pihak sekolah maupun pemerintah.

4) Threats (ancaman)

Threats faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau merugikan organisasi. Ancaman ini bisa berupa persaingan, perubahan regulasi yang merugikan, atau krisis ekonomi yang mengurangi kemampuan organisasi untuk beroperasi secara efektif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal mengatakan bahwa:

“Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Gowa. Pertama, banyak anak, khususnya di wilayah pedesaan, yang lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Mereka lebih memilih bercocok tanam, bertani, atau berkebun karena menganggap bisa langsung memperoleh penghasilan tanpa perlu menempuh pendidikan tinggi. Kedua, banyak anak yang memilih untuk menjadi tenaga kerja, terutama setelah lulus SMA. Beberapa dari mereka mengikuti orang tuanya ke luar daerah atau ke luar negeri untuk bekerja. Selain itu, terdapat juga kasus anak yang putus sekolah karena orang tua bercerai, tidak memiliki motivasi untuk sekolah, atau lebih memilih untuk tinggal di tempat lain.” (Hasil wawancara, HA, tanggal 25 April 2025)

Hariyanti menyampaikan bahwa faktor sosial-ekonomi sangat berpengaruh terhadap keputusan anak untuk berhenti sekolah, terutama di wilayah pedesaan. Di banyak desa, anak-anak cenderung lebih memilih untuk bekerja di sektor pertanian, bertani, atau berkebun, karena pekerjaan ini dianggap dapat langsung menghasilkan uang dan lebih berguna untuk membantu perekonomian keluarga. Pendidikan sering kali dianggap sebagai pilihan yang kurang menguntungkan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Selain itu, banyak anak yang melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA dan kemudian memilih untuk bekerja, mengikuti orang tua mereka ke luar daerah atau bahkan keluar negeri. Tidak jarang, anak-anak juga putus sekolah karena masalah keluarga, seperti perceraian orang tua, atau karena mereka kehilangan motivasi untuk bersekolah. Ada juga kasus di mana anak lebih memilih untuk tinggal di tempat lain, misalnya ikut keluarga lain yang lebih mendukung ekonomi keluarga mereka.

Berdasarkan hasil penelitian ini, strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam menangani masalah anak putus sekolah menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan. Program-program seperti pendidikan gratis, pemberian beasiswa, dan pemanfaatan sistem dasbor digital untuk memverifikasi data anak yang tidak sekolah telah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang terputus dari jalur formal. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah desa, dan lembaga internasional, turut memperkuat pelaksanaan strategi ini.

Meskipun ada tantangan, seperti jumlah PKBM yang masih terbatas dan perluasan koordinasi antar lembaga, kebijakan yang ada sudah memberikan dasar yang kuat dalam upaya mengurangi angka putus sekolah. Pemanfaatan teknologi dan pelibatan masyarakat di tingkat desa juga memberikan dampak positif terhadap efektivitas program ini, memastikan bahwa pendataan dan intervensi dapat dilakukan dengan lebih akurat dan tepat sasaran.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dapat dianggap efektif, meskipun masih memerlukan penyempurnaan untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa depan.

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dilaksanakan melalui berbagai program yang telah dirancang untuk mengatasi permasalahan pendidikan, khususnya anak putus sekolah. Pelaksanaan strategi ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, seperti pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, serta instansi terkait lainnya. Beberapa langkah konkret yang dilakukan antara lain penyisiran langsung ke lapangan untuk mendata anak yang tidak sekolah, penyelenggaraan layanan pendidikan alternatif, pemberian beasiswa, serta penguatan peran guru dan kepala sekolah dalam mendeteksi potensi siswa putus sekolah sejak dini. Dinas Pendidikan juga menugaskan tim khusus yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan pendampingan program. Seluruh pelaksanaan strategi ini diarahkan agar berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan lokal, serta memperhatikan efisiensi waktu, sumber daya, dan keberlanjutan program. Keberhasilan implementasi strategi ditandai dengan meningkatnya partisipasi pendidikan dan berkurangnya jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan formal di beberapa wilayah.

3.1 kendala yang dihadapi selama pelaksanaan strategi di lapangan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa:

“Hingga saat ini, tidak terdapat kendala besar dalam pelaksanaan strategi. Hal ini karena koordinasi yang baik mulai

dari tingkat bawah pengawas sekolah, koordinator wilayah kecamatan hingga ke Dinas Pendidikan. Setiap kendala yang muncul dilaporkan secara langsung untuk segera ditangani tanpa menunggu waktu lama.” (Hasil wawancara, MA, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa pelaksanaan strategi untuk mencegah anak putus sekolah sejauh ini berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala besar. Keberhasilan ini disebabkan oleh koordinasi yang solid antara berbagai tingkatan, mulai dari pengawas sekolah, koordinator wilayah kecamatan, hingga ke Dinas Pendidikan. Setiap persoalan yang muncul dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti tanpa menunggu proses yang berlarut, sehingga tidak menghambat jalannya program.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mengatakan bahwa:

“Kendala utama yang dihadapi adalah pada aspek pendataan. Dinas Pendidikan tidak memiliki petugas khusus untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan, sehingga pendataan sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah desa. Hal ini terkadang membuat data yang diperoleh kurang akurat atau tidak terkini.” (Hasil wawancara, MW, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam upaya penanganan anak putus sekolah berada pada aspek pendataan. Dinas Pendidikan belum memiliki petugas khusus yang turun langsung ke lapangan, sehingga proses pendataan sangat bergantung pada kontribusi pemerintah desa. Ketergantungan

ini membuat data yang diperoleh sering kali tidak akurat atau sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru, yang akhirnya dapat memengaruhi ketepatan intervensi yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal mengatakan bahwa:

"Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data. Contohnya, anak yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan masih berusia sekolah dianggap masih berada di wilayah tersebut, padahal kenyataannya mereka telah pindah mengikuti orang tua atau berada di luar negeri. Kendala lainnya adalah adanya anak-anak yang tidak lagi memiliki minat untuk melanjutkan sekolah. Dalam kasus ini, mereka diarahkan ke pendidikan nonformal karena lebih fleksibel. PKBM memberikan pembelajaran dengan jadwal yang disesuaikan dengan kondisi peserta, baik pagi, sore, maupun malam. Bahkan anak yang menikah di usia dini masih dapat mengikuti pendidikan nonformal selama masih masuk kategori usia sekolah." (Hasil wawancara, HA, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menjelaskan dua kendala besar yang sering dihadapi. Pertama, masalah ketidaksesuaian data, seperti anak yang masih tercatat dalam Kartu Keluarga tetapi sebenarnya sudah pindah ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri. Kedua, adalah rendahnya motivasi sebagian anak untuk melanjutkan pendidikan formal. Untuk mengatasi hal ini, mereka dialihkan ke jalur pendidikan nonformal seperti PKBM yang memberikan pembelajaran fleksibel, baik pagi, siang, maupun malam. Jalur ini juga memungkinkan anak yang menikah di usia dini tetap dapat mengakses pendidikan sesuai dengan usia sekolah.

Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Ada juga kendala dari sisi fasilitas, seperti kurangnya ruang kelas di beberapa sekolah. Tapi sejauh ini, pemerintah terus berusaha menambah bangunan baru.” (Hasil wawancara, AN, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini mengungkapkan kendala dari sisi infrastruktur, terutama kekurangan ruang kelas di beberapa sekolah. Kondisi ini bisa memengaruhi kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar. Meski begitu, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dengan membangun ruang kelas tambahan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Berdasarkan temuan di lapangan, implementasi strategi penanggulangan anak putus sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta instansi terkait, melalui langkah-langkah konkret seperti penyisiran langsung, layanan pendidikan alternatif, pemberian beasiswa, dan penguatan peran guru. Indikator keberhasilan implementasi terlihat dari meningkatnya partisipasi pendidikan di beberapa wilayah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama pada aspek pendataan, ketidaksesuaian data, rendahnya motivasi anak, serta keterbatasan fasilitas fisik seperti ruang kelas.

Namun secara umum, koordinasi yang baik di tingkat internal dan dukungan lintas sektor telah memungkinkan pelaksanaan strategi tetap berjalan secara optimal.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian strategi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai langkah penting untuk memastikan efektivitas program penanganan masalah pendidikan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pelaporan dari sekolah, monitoring langsung di lapangan, serta forum koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah kecamatan dan desa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan mencapai sasaran, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Pengendalian dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, melakukan penyesuaian kebijakan, serta memberikan tindak lanjut atas temuan evaluasi, baik dalam bentuk pelatihan ulang, revisi program, maupun penambahan sumber daya. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi yang dijalankan selaras dengan dinamika sosial serta kebutuhan pendidikan di Kabupaten Gowa.

Progres Sinkronisasi PKBM Kabupaten Gowa

1. Kec. Bontomarannu

Tabel 4. 1 Singkronisasi PKBM Kecamatan Bontomarannu

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik	R. Kelas	R. Mapel
1	PKBM ISLAM MAAFAZA	P9984724	PKBM	Swasta	25 Apr 2025 19:49:14	274	18	24	7	21	—
2	PKBM LE CENDEKIA	P9984775	PKBM	Swasta	12 Feb 2025 08:47:38	57	6	10	1	6	—
3	PKBM MATAHARI	P9926484	PKBM	Swasta	25 Apr 2025 15:33:25	510	26	6	2	8	—
4	PKBM SIPAKAINGA	P2964730	PKBM	Swasta	27 Apr 2025 06:42:46	18	6	0	1	4	—
	TOTAL	—	—	—	—	859	56	40	11	39	—

2. Kec. Bontonompo

Tabel 4. 2 Singkronisasi PKBM Kecamatan Bontonompo

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik
1	PKBM AL-HIJRAH	P2967132	PKBM	Swasta	17 Apr 2025 14:04:51	400	19	8	1
2	PKBM Jabal Nur Balaburu	P9980026	PKBM	Swasta	17 Apr 2025 16:30:03	518	18	9	1
	TOTAL	—	—	—	—	918	37	17	2

3. Kec. Bungaya

Tabel 4. 3 Singkronisasi PKBM Kecamatan Bungaya

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik	R. Kelas
1	PKBM MINASANTA	P9952772	PKBM	Swasta	25 Apr 2025 17:06:19	1.045	54	10	1	1
	TOTAL	—	—	—	—	1.045	54	10	1	1

4. Kec. Manuju

Tabel 4. 4 Singkronisasi PKBM Kecamatan Manuju

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik	R. Kelas	R. Lab
1	PKBM AL MUBARAQ	P9926481	PKBM	Swasta	15 Apr 2025 20:49:43	218	10	0	0	2	2
2	PKBM AL-HIDAYAH	P9926489	PKBM	Swasta	25 Apr 2025 10:36:20	616	26	5	2	4	4
3	PKBM GURU TASENG (GURUTA)	P9934606	PKBM	Swasta	27 Apr 2025 14:02:29	181	19	0	2	9	3
4	PKBM MUHAMMAD AQIL	P9908561	PKBM	Swasta	23 Apr 2025 23:15:07	516	40	6	1	3	2
	TOTAL	—	—	—	—	1.531	95	11	5	18	11

5. Kec. Tinggi moncong

Tabel 4. 5 Singkronisasi PKBM Kecamatan Tinggi Moncong

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik	R. Kelas	R. Lab
1	PKBM RAMPE RIBAJI	P2967146	PKBM	Swasta	25 Apr 2025 00:38:24	241	11	5	2	9	0
	Total					241	11	5	2	9	0

6. Kec. Tompobulu

Tabel 4. 6 Singkronisasi PKBM Kecamatan Tompobulu

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik	R. Kelas	R. Lab
1	PKBM AN-NUR	P9926335	PKBM	Swasta	19 Apr 2025 10:09:42	265	11	8	1	6	0
	Total					265	11	8	1	6	0

7. Kec. Somba Opu

Tabel 4. 7 Singkronisasi PKBM Kecamatan Somba Opu

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik
1	PKBM KREATIF	P2967108	PKBM	Swasta	24 Apr 2025 08:58:13	141	13	4	-
2	PKBM NUR ARSYFA	P9984897	PKBM	Swasta	25 Apr 2025 13:01:42	82	5	2	-
3	PKBM PUNGGAWA SIKOLA MANDIRI	P9996119	PKBM	Swasta	27 Aug 2024 09:10:50	0	0	0	-
Total						223	18	6	-

8. Kec. Bontonompo Selatan

Tabel 4. 8 Singkronisasi PKBM Kecamatan Bontonompo Selatan

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik	R. Kelas
1	PKBM MUTIARA SALAJO	P9999757	PKBM	Swasta	27 Sep 2024 16:15:12	0	0	0	2	2
2	PKBM UMINDA H	P2967135	PKBM	Swasta	31 Aug 2024 12:11:04	0	0	0	12	1
	Total					0	0	0	14	3

9. Kec. Pallangga

Tabel 4. 9 Singkronisasi PKBM Kecamatan Pallangga

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PD	Rombel	Guru	Tendik
1	PKBM AL RAZIQ	P9984515	PKBM	Swasta	27 Apr 2025 07:56:29	295	20	6	3
2	PKBM HABIAH UMMU AULIYAH	P9999722	PKBM	Swasta	16 Dec 2024 22:13:56	0	0	0	0
3	PKBM MEGAH BUANA MANDIRI	P9996722	PKBM	Swasta	16 Apr 2025 10:33:04	648	33	13	1
4	PKBM SEJATI	P9970505	PKBM	Swasta	24 Feb 2025 21:01:42	5	3	0	0
5	PKBM Sipakale bbi	P9970465	PKBM	Swasta	24 Apr 2025 19:20:46	159	11	2	0
6	PKBM SURYA MANDIRI	P2966320	PKBM	Swasta	18 Apr 2025 12:38:06	350	23	8	2
Total						1457	90	29	7

Berdasarkan hasil penggabungan tabel progres sinkronisasi PKBM se-Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan telah menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam meminimalisir permasalahan pendidikan, khususnya terkait anak putus sekolah. Hal ini tercermin dari jumlah peserta didik (PD) yang tinggi di sejumlah PKBM, seperti PKBM MINASANTA di Kecamatan Bungaya dengan 1.045 peserta didik, PKBM MEGAH BUANA MANDIRI di Kecamatan Pallangga dengan 648 peserta didik, serta PKBM MUHAMMAD AQIL di Kecamatan Manuju dengan 516 peserta didik. Angka ini menandakan bahwa banyak anak yang sebelumnya berpotensi atau telah mengalami putus sekolah kini telah kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal.

Selain itu, keberadaan PKBM yang merata di hampir seluruh kecamatan, termasuk di wilayah terpencil seperti Tompobulu, Manuju, dan Tinggimoncong, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah menjalankan strategi pemerataan akses pendidikan dengan baik. Kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga cukup memadai di banyak PKBM, yang memperkuat fungsi lembaga dalam memberikan layanan pendidikan alternatif yang berkualitas. Monitoring yang dilakukan secara berkala melalui pembaruan data (*sinkronisasi*) di sistem pusat juga menjadi indikator bahwa sistem pengawasan dan evaluasi berjalan secara aktif.

Dengan berbagai capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam menangani permasalahan anak putus sekolah telah berjalan secara efektif. PKBM telah menjadi solusi nyata dalam menampung dan mendidik anak-anak yang tidak dapat tertampung di sekolah formal, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

4.1 Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mengevaluasi keberhasilan program-program yang dijalankan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa:

"Evaluasi dilakukan melalui laporan-laporan dari masyarakat dan pengawas pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan. Laporan ini membantu Dinas Pendidikan memantau apakah ada anak yang tidak bersekolah atau jika ada sekolah yang mengalami keterlambatan dalam peningkatan mutu pendidikan. Evaluasi dilakukan secara berkala dan tidak terpaku pada waktu tertentu." (Hasil wawancara, MA, tanggal 25 April 2025)

Wawancara ini menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui laporan dari masyarakat dan pengawas pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan. Laporan-laporan tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk memantau kondisi di lapangan, termasuk mendeteksi anak-anak yang tidak bersekolah atau sekolah yang mengalami hambatan dalam peningkatan mutu. Evaluasi ini bersifat rutin namun tidak selalu terikat waktu tertentu, sehingga

dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mengatakan bahwa:

"Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah program dijalankan. Data awal meliputi jumlah anak yang putus sekolah dan anak yang tidak sekolah. Kemudian dibandingkan dengan jumlah anak yang telah berhasil dikembalikan ke sekolah dan yang telah menyelesaikan pendidikan. Jika terdapat peningkatan yang signifikan, maka program dianggap berhasil. Namun jika tidak, maka program dianggap kurang efektif dan perlu dievaluasi ulang." (Hasil wawancara, MW, tanggal 25 April 2025)

Wawancara ini menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan dengan membandingkan data kuantitatif sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Fokus utama evaluasi adalah jumlah anak yang tidak sekolah dibandingkan dengan jumlah anak yang berhasil dikembalikan atau menyelesaikan pendidikan. Jika terjadi peningkatan signifikan dalam angka partisipasi sekolah, maka program dinilai berhasil. Sebaliknya, jika tidak ada perkembangan, maka program dianggap perlu ditinjau ulang atau diperbaiki.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal mengatakan bahwa:

"Evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin bulanan yang disebut "pertemuan kombel", di mana jumlah peserta didik didata. Jika terjadi peningkatan jumlah peserta, maka program dianggap berhasil. Namun, kendala tetap ada, seperti data anak yang masih terdaftar di KK padahal sudah pindah, sehingga mempengaruhi akurasi evaluasi." (Hasil wawancara, HA, tanggal 25 April 2025)

Wawancara ini menjelaskan bahwa proses evaluasi juga dilakukan melalui pertemuan rutin bulanan yang disebut "pertemuan kombel". Dalam pertemuan ini, jumlah peserta didik akan didata dan dianalisis. Jika jumlahnya meningkat, maka program dianggap efektif. Namun, akurasi evaluasi terkadang terganggu oleh ketidaksesuaian data kependudukan, seperti anak yang masih tercatat dalam KK tetapi sebenarnya sudah pindah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang mengatakan bahwa:

"Setiap ada laporan dari sekolah atau warga, langsung ditindaklanjuti. Jadi kita tahu daerah mana yang masih perlu perhatian lebih soal pendidikan." (Hasil wawancara, MT, tanggal 25 April 2025)

Wawancara ini menunjukkan bahwa laporan dari warga atau sekolah ditindaklanjuti dengan cepat oleh pihak terkait. Respons cepat ini membantu pihak berwenang mengetahui wilayah mana yang masih memerlukan perhatian khusus dalam hal pendidikan, sehingga proses evaluasi menjadi lebih tepat sasaran.

4. 2 Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa jika strategi tidak berjalan efektif

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, belum ditemukan strategi yang tidak berjalan efektif. Hal ini berkat kerja sama yang solid antara semua pihak, mulai dari tingkat bawah hingga ke dinas pusat. Selain itu, keberadaan tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga sangat membantu dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dinas Pendidikan juga memberikan reward atau penghargaan kepada guru yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa.” (Hasil wawancara, MA, tanggal 25 April 2025)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa sejauh ini belum ditemukan strategi yang tidak efektif dalam pelaksanaan program pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kerja sama yang baik dari seluruh jenjang pemerintahan dan pemangku kepentingan. Kehadiran guru PPPK juga dinilai sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, pemberian penghargaan kepada guru berprestasi menjadi bentuk motivasi sekaligus penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam mendorong mutu pendidikan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF mengatakan bahwa:

“Jika tidak terdapat peningkatan dalam jumlah anak yang kembali bersekolah, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa strategi yang diterapkan kurang berhasil. Langkah perbaikan dilakukan dengan mengevaluasi kembali kekurangan program dan melakukan pendampingan serta edukasi langsung kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.” (Hasil wawancara, MW, tanggal 25 April 2025)

Wawancara ini menekankan bahwa indikator keberhasilan program adalah peningkatan jumlah anak yang kembali bersekolah. Jika tidak terjadi peningkatan, maka strategi yang diterapkan dianggap kurang berhasil. Sebagai bentuk perbaikan, dilakukan evaluasi terhadap kelemahan program serta pendampingan dan edukasi langsung kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal mengatakan bahwa:

"Langkah perbaikan dilakukan dengan menasar lebih dalam hingga ke tingkat RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan. Jika anak tidak bisa diajak kembali ke sekolah formal, maka diarahkan ke pendidikan nonformal yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Selain itu, ada juga pembelajaran daring bagi wilayah terpencil. Contohnya, lembaga PKBM dari wilayah dataran tinggi Manuju membuka kelas di Pattallasang dengan sistem belajar tiga kali seminggu. Mereka membuat grup komunikasi untuk mengatur jadwal pertemuan." (Hasil wawancara, HA, tanggal 25 April 2025)

Wawancara ini menunjukkan bahwa strategi perbaikan juga dilakukan dengan pendekatan lebih mendalam, menasar hingga ke tingkat RT, RW, desa, dan kecamatan. Anak-anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal diarahkan ke jalur pendidikan nonformal. Selain itu, untuk menjangkau daerah terpencil, diterapkan sistem pembelajaran daring. Salah satu contohnya adalah PKBM dari wilayah dataran tinggi Manuju yang membuka kelas di Pattallasang

dengan jadwal fleksibel dan sistem komunikasi daring yang disesuaikan dengan kondisi peserta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau ada yang tidak berhasil, biasanya pemerintah mengubah pendekatannya. Misalnya dulu terlalu banyak teori, sekarang lebih ke praktik atau pelatihan keterampilan.” (Hasil wawancara, AN, tanggal 25 April 2025)

Wawancara ini menjelaskan bahwa pemerintah juga bersikap adaptif dalam memperbaiki program. Pendekatan yang awalnya terlalu teoritis mulai diganti dengan pendekatan yang lebih praktis, seperti pelatihan keterampilan, agar lebih relevan dan menarik minat anak-anak untuk tetap mengikuti pendidikan.

Berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah berhasil menjalankan program pendidikan nonformal melalui PKBM untuk menanggulangi masalah anak putus sekolah, dengan angka peserta didik yang signifikan di beberapa kecamatan. Evaluasi rutin dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan pengawas pendidikan, serta perbandingan data sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Meskipun ada tantangan terkait akurasi data dan wilayah terpencil, langkah perbaikan dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam di tingkat lokal dan penggunaan metode pembelajaran daring serta pelatihan keterampilan. Secara keseluruhan, program yang dijalankan terbukti efektif dalam

meningkatkan akses pendidikan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaannya.

C. Pembahasan

1. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan terhadap lingkungan sosial, ekonomi, geografis, dan budaya merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam perumusan strategi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan, khususnya fenomena anak putus sekolah. Pendekatan berbasis pengamatan ini memungkinkan Dinas Pendidikan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Dengan demikian, strategi yang dikembangkan menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara penyebab anak putus sekolah di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Di wilayah dataran tinggi, fenomena migrasi tenaga kerja, khususnya perempuan (TKW), menjadi penyebab dominan anak-anak putus sekolah. Anak-anak yang mengikuti orang tua mereka ke luar negeri tidak dapat melanjutkan pendidikan di tempat asal karena keterbatasan sistem pendidikan di negara tujuan, serta minimnya akses terhadap

pendidikan bagi anak migran. Sementara itu, wilayah dataran rendah menunjukkan angka putus sekolah yang relatif lebih rendah, berkat penerapan Peraturan Daerah yang mewajibkan pendidikan sampai usia 12 tahun, serta adanya program pendidikan gratis yang secara signifikan mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF memperkuat temuan ini, dengan menambahkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi akar masalah utama. Banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak, apalagi jika menyangkut jenjang pendidikan menengah atas. Di samping itu, motivasi anak sendiri untuk melanjutkan sekolah juga menjadi masalah yang tidak kalah penting. Lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta kurangnya peran aktif dari orang tua dalam menanamkan pentingnya pendidikan, membuat sebagian anak kehilangan minat untuk bersekolah. Tidak hanya itu, kondisi geografis juga turut memperparah keadaan, khususnya di dataran tinggi yang memiliki akses terbatas ke fasilitas pendidikan.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Nonformal, diungkapkan bahwa pilihan bekerja sering kali dianggap lebih menarik oleh anak-anak di daerah pedesaan dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan. Mereka lebih memilih bekerja di sektor pertanian, berkebun, atau bahkan

merantau ke luar daerah untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya positif dan perlu adanya intervensi berupa penyuluhan, pembinaan, serta peningkatan kesejahteraan agar pendidikan dapat menjadi prioritas utama. Di samping itu, permasalahan sosial seperti perceraian orang tua juga menjadi penyebab turunnya semangat belajar anak hingga akhirnya memilih untuk tidak bersekolah.

Pendapat dari masyarakat juga mengafirmasi berbagai temuan di atas. Seorang warga dari wilayah dataran tinggi menyampaikan bahwa banyak anak putus sekolah karena mengikuti ibu mereka yang bekerja di luar negeri, sedangkan warga lainnya menambahkan bahwa kondisi ekonomi yang lemah sering kali membuat anak-anak harus membantu orang tua bekerja, baik di ladang maupun di rumah. Perspektif ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memaksa anak-anak untuk mendahulukan kontribusi langsung pada penghasilan keluarga dibandingkan investasi jangka panjang melalui pendidikan. Salah satu warga bahkan mengeluhkan sulitnya akses transportasi sebagai penyebab anak-anak tidak dapat bersekolah. Jarak yang jauh ke sekolah serta ketiadaan transportasi umum membuat pendidikan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat terpencil.

Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah merancang beberapa strategi identifikasi dan pendataan anak-

anak yang putus sekolah. Salah satunya adalah melalui keberadaan Koordinator Wilayah Kecamatan yang bertugas untuk memantau kondisi pendidikan di setiap kelurahan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, diketahui bahwa peran koordinator ini sangat penting dalam mendeteksi kasus anak putus sekolah. Mereka menjadi penghubung langsung antara Dinas dan masyarakat dalam memperoleh informasi valid dan aktual.

Selain itu, Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF menjelaskan adanya program "Kembali ke Sekolah" yang merupakan kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Bappeda, dan pemerintah desa. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah dan mengarahkan mereka kembali ke jalur pendidikan formal atau nonformal. Program ini bersifat adaptif, di mana anak-anak yang masih memiliki kesempatan kembali ke sekolah difasilitasi, sementara mereka yang sudah terlanjur lama berhenti diberikan pendidikan melalui jalur nonformal seperti PKBM agar tetap memperoleh akses belajar dan keterampilan hidup.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal menambahkan bahwa Dinas Pendidikan juga memanfaatkan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai alat untuk memantau perkembangan dan data siswa secara real time. Sistem ini memungkinkan Dinas untuk segera mengetahui apabila ada siswa

yang berhenti sekolah dan langsung melakukan penelusuran lanjutan. Dengan data yang akurat, tindakan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dari sisi masyarakat, diketahui bahwa peran aktif kepala sekolah dan guru juga menjadi bagian penting dalam proses identifikasi. Ketika terdapat siswa yang tidak hadir dalam jangka waktu lama, informasi tersebut dilaporkan kepada petugas kecamatan untuk ditindaklanjuti. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan anak putus sekolah di Kabupaten Gowa melibatkan sinergi antara institusi formal dan masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyebab anak putus sekolah sangat kompleks dan bervariasi, tergantung pada kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Namun demikian, strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan arah yang positif, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dan data-driven dalam melakukan identifikasi serta penanganan terhadap anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini menjadi langkah penting untuk menjamin hak pendidikan bagi setiap anak dan mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Gowa.

Data pada tabel juga menunjukkan bahwa kasus pernikahan anak di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022, dengan 95 kasus

dispensasi pernikahan anak yang tercatat. Kenaikan ini diduga berkaitan erat dengan dampak sosial ekonomi selama masa pandemi, lemahnya kontrol sosial, serta kurangnya edukasi tentang pentingnya melanjutkan pendidikan formal di kalangan remaja dan orang tua. Meski demikian, pada tahun 2023 jumlah kasus mengalami penurunan drastis menjadi 29 kasus, yang mengindikasikan mulai efektifnya intervensi pemerintah daerah, termasuk penyusunan SOP Pencegahan Pernikahan Anak dan peran aktif lembaga seperti PKK dan Dinas PPPA. Namun, jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena berdampak langsung pada tingginya angka anak putus sekolah, terutama di wilayah pedalaman dan rentan.

Dengan demikian, pernikahan anak dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor eksternal yang perlu diperhatikan dalam pengamatan lingkungan strategis oleh Dinas Pendidikan. Data ini menunjukkan bahwa strategi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat, sehingga pendekatan yang holistik dan lintas sektor sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang responsif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengamatan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memainkan peran yang sangat penting dalam proses perumusan strategi penanggulangan anak putus sekolah. Penelitian ini sejalan

dengan penelitian Kusumaningrum et al (2024) yang mengemukakan bahwa lembaga pendidikan perlu terus menerus melakukan pemantauan dan analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlanjutan lembaga atau organisasi. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kontekstual, di mana kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis masyarakat dijadikan sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan. Informasi yang dihimpun dari satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan menjadi sumber data yang valid untuk memahami akar persoalan di setiap wilayah. Pendekatan ini sejalan dengan teori perumusan kebijakan berbasis kebutuhan lokal (need-based planning), yang menekankan pentingnya identifikasi kondisi riil masyarakat sebelum merancang solusi. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga adaptif terhadap karakteristik lokal. Meskipun efektivitas jangka panjang masih perlu dikaji lebih lanjut, pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran positif menuju kebijakan yang lebih responsif dan terarah.

2. Perumusan Strategi

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa merancang strategi penanggulangan anak putus sekolah dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan. Proses

perumusan strategi ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pengamatan langsung terhadap permasalahan pendidikan di berbagai wilayah, khususnya yang berkaitan dengan tingginya angka anak tidak sekolah. Pendekatan ini dimulai dari pengumpulan data dan informasi melalui pemantauan rutin, koordinasi dengan satuan pendidikan, hingga penyampaian laporan dan keluhan dari masyarakat serta aparat desa. Strategi disusun berdasarkan identifikasi akar masalah baik dari sisi ekonomi keluarga, faktor geografis, hingga budaya lokal yang turut memengaruhi minat dan kemampuan anak untuk melanjutkan pendidikan.

Langkah awal perumusan strategi adalah melakukan penyisiran data anak tidak sekolah secara menyeluruh. Data ini diperoleh melalui sistem informasi pendidikan yang terintegrasi, termasuk melalui dasbor digital yang telah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan. Melalui dasbor ini, pihak desa diberikan akses untuk turut serta melakukan verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah, sehingga pelibatan masyarakat tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar menjadi bagian aktif dari perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.

Seluruh strategi kemudian dikonsolidasikan dalam bentuk kebijakan yang sistematis dan adaptif, disesuaikan dengan potensi, tantangan, dan kapasitas lokal. Strategi ini mencakup pelaksanaan program pendidikan gratis, beasiswa, pelibatan PKBM sebagai penyedia pendidikan nonformal, hingga kampanye partisipatif yang

melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi pemuda. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistriani (2021) yang menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan melalui program pemerintah memberikan bantuan berupa Program Indonesia Pintar, serta Bantuan Siswa Miskin untuk mengantisipasi terjadinya anak putus sekolah. Semua kebijakan ini diarahkan untuk membentuk ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu Kholifah (2021) mengemukakan bahwa Perumusan kebijakan pendidikan sangat penting untuk dilaksanakan agar tujuan pendidikan yang telah disusun dapat dicapai secara maksimal.

Analisis SWOT Strategi Penanggulangan Anak Putus Sekolah

1. Strengths (Kekuatan)

Salah satu kekuatan utama strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah keberadaan program pendidikan gratis. Program ini telah lama dijalankan dan memberikan dampak signifikan dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Dalam wawancara yang dilakukan, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menekankan bahwa strategi ini efektif dalam mendorong orang tua untuk terus menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan dihapuskannya biaya sekolah, hambatan finansial yang kerap menjadi alasan utama anak putus sekolah dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, kekuatan lain yang mendukung keberhasilan strategi adalah inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dinas Pendidikan telah mengembangkan sistem dasbor digital yang memuat data anak-anak tidak sekolah secara detail dan akurat. Menariknya, sistem ini juga dapat diakses oleh pemerintah desa, sehingga terjadi integrasi data antara tingkat pusat dan akar rumput. Dengan adanya verifikasi dan validasi yang dilakukan langsung oleh perangkat desa, data yang dikumpulkan menjadi lebih kredibel dan dapat dijadikan dasar dalam menentukan intervensi pendidikan yang sesuai baik dalam bentuk pengembalian ke sekolah formal, maupun pengalihan ke jalur pendidikan nonformal.

Dukungan yang kuat terhadap pendidikan nonformal juga menjadi kekuatan lain dalam strategi Dinas Pendidikan. Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), anak-anak yang sudah lama putus sekolah diberi kesempatan untuk memperoleh ijazah setara melalui Paket A, B, dan C. Strategi ini sangat inklusif karena memungkinkan anak untuk tetap mendapatkan pengakuan pendidikan, meskipun tidak berada di jalur formal. Aktivitas tutor yang aktif mendata langsung ke lapangan menjadikan pendekatan ini lebih personal dan tepat sasaran.

Selanjutnya, program beasiswa khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin menjadi bagian penting dalam memperkuat

jaring pengaman sosial. Dengan adanya beasiswa, anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus terlalu khawatir dengan kebutuhan sekolah. Hal ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Di balik kekuatan yang dimiliki, strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa masih menghadapi berbagai tantangan internal yang perlu segera diatasi. Salah satunya adalah jumlah PKBM yang aktif masih tergolong terbatas. Dari total 32 PKBM yang ada di Kabupaten Gowa, hanya sekitar 22–23 yang aktif menjalankan fungsi pelayanan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi layanan pendidikan nonformal belum merata di seluruh wilayah. Padahal, pendidikan nonformal sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah yang aksesnya sulit dijangkau oleh pendidikan formal.

Minimnya jumlah PKBM aktif tentu berdampak pada daya jangkauan program-program pendidikan. Beberapa wilayah yang jauh dari pusat kota atau berada di daerah pedalaman kemungkinan besar tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Selain itu, ketidakaktifan sebagian PKBM dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya tenaga pengajar, keterbatasan anggaran operasional, hingga rendahnya minat masyarakat

terhadap pendidikan nonformal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan PKBM agar strategi penanggulangan anak putus sekolah dapat lebih menyeluruh.

Kelemahan lainnya adalah kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, khususnya dalam pelaksanaan program hingga ke tingkat desa. Walaupun berbagai pihak telah dilibatkan, seringkali koordinasi tidak berjalan dengan merata. Beberapa desa mungkin sangat aktif, sementara desa lainnya cenderung pasif. Ketidakseimbangan ini bisa menghambat efektivitas implementasi strategi di lapangan.

3. Opportunities (Peluang)

Strategi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memiliki peluang besar untuk semakin diperkuat melalui sinergi multipihak. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan telah menjadi bagian penting dalam strategi ini. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, hingga lembaga internasional seperti UNICEF turut berperan dalam mendukung upaya penanggulangan anak putus sekolah. Kolaborasi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam proses pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan program.

Pendekatan berbasis masyarakat (community-based) terbukti sangat efektif karena informasi yang diperoleh bersifat

lokal dan kontekstual. Tokoh masyarakat seperti imam masjid dan kepala dusun memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi sosial warganya, sehingga mampu memberikan masukan yang akurat dan relevan dalam penyusunan program.

Selain itu, keterlibatan organisasi kepemudaan seperti karang taruna membuka ruang partisipasi yang lebih luas, khususnya dari kalangan generasi muda. Peran ini penting karena anak muda cenderung lebih dekat dengan kelompok sebaya dan dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungannya.

Program-program unggulan seperti kegiatan mengaji sebelum pembelajaran serta pemberian seragam gratis juga memberikan nilai tambah dalam membangun karakter, motivasi, dan semangat belajar anak-anak. Ini adalah bentuk pendekatan kultural dan sosial yang bisa terus dikembangkan untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan menyenangkan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam menangani anak putus sekolah telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik, meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Program pendidikan gratis, pemberian beasiswa, dan pemanfaatan teknologi seperti sistem dasbor digital untuk memverifikasi data anak yang tidak sekolah menjadi langkah-langkah yang signifikan dalam memperbaiki

akses pendidikan. Hal ini juga didukung oleh kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah desa, lembaga internasional, maupun masyarakat, yang turut berperan dalam pengumpulan data dan pelaksanaan program.

Namun, meskipun ada kemajuan yang positif, terdapat beberapa kelemahan, seperti terbatasnya jumlah PKBM yang aktif dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi secara menyeluruh. Jumlah PKBM yang masih terbatas mengindikasikan bahwa masih ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau, yang menjadi tantangan besar dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah PKBM yang aktif dan memperkuat koordinasi antar lembaga di tingkat desa.

Secara keseluruhan, meskipun strategi yang diterapkan telah memberikan dampak yang positif, perbaikan dalam beberapa aspek, seperti perluasan jangkauan layanan pendidikan nonformal dan peningkatan koordinasi antar lembaga, akan semakin meningkatkan efektivitas dari program-program yang ada.

4. Threats (Ancaman)

Meskipun strategi telah dirancang dan dijalankan dengan cukup baik, ancaman eksternal masih menjadi tantangan serius

dalam upaya menurunkan angka anak putus sekolah. Faktor sosial-ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Banyak anak, khususnya di wilayah pedesaan, lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Mereka menganggap bahwa bekerja di sektor pertanian, perkebunan, atau menjadi buruh lebih memberikan hasil langsung dibandingkan melanjutkan sekolah yang tidak menjamin pekerjaan di masa depan. Hal ini mencerminkan adanya pandangan pragmatis terhadap pendidikan di kalangan masyarakat.

Tidak hanya itu, migrasi anak-anak untuk mengikuti orang tua bekerja ke luar daerah atau luar negeri juga menjadi alasan umum anak putus sekolah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan masih belum dianggap sebagai prioritas utama dalam perencanaan hidup keluarga, terutama dari kelompok miskin. Ada pula kasus anak-anak yang mengalami disfungsi keluarga, seperti perceraian orang tua atau tinggal berpindah-pindah, sehingga sulit mempertahankan kesinambungan pendidikan.

Ancaman lainnya adalah rendahnya motivasi anak untuk belajar, baik karena lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya peran orang tua, maupun kondisi sekolah yang tidak menarik. Faktor-faktor ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan agar strategi yang ada dapat menjangkau dimensi psikologis dan sosial anak, bukan hanya aspek

administratif atau material.

3. Implementasi Strategi

Upaya mengatasi anak putus sekolah merupakan salah satu prioritas strategis dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Gowa. Dalam konteks ini, implementasi strategi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa tidak hanya difokuskan pada penyediaan akses pendidikan secara umum, tetapi juga diarahkan pada identifikasi menyeluruh terhadap akar permasalahan, penyesuaian kebijakan dengan karakteristik wilayah, serta pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Dengan kata lain, strategi yang diterapkan bukan sekadar reaktif, melainkan bersifat holistik, adaptif, dan kolaboratif.

Implementasi strategi dimulai dari tahap perencanaan berbasis data dan kondisi faktual. Salah satu bentuk implementasi yang paling mencolok adalah kegiatan penyisiran langsung ke lapangan untuk mendata anak-anak yang tidak atau belum terdaftar dalam lembaga pendidikan formal. Penyisiran ini dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan partisipatif. Artinya, petugas yang turun ke lapangan tidak hanya melakukan pencatatan administratif, tetapi juga berdialog dengan keluarga, aparat desa, dan tokoh masyarakat untuk mengetahui alasan anak-anak tersebut tidak bersekolah. Data ini kemudian diolah sebagai dasar utama dalam menyusun program intervensi yang relevan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan tidak bekerja sendiri, melainkan membangun jejaring kemitraan lintas sektor. Pemerintah desa berperan sebagai mitra utama dalam hal penyediaan data dan informasi, karena aparat desa memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial masyarakatnya. Sekolah juga dilibatkan secara aktif, khususnya dalam mendeteksi potensi siswa yang berisiko putus sekolah. Para guru dan kepala sekolah diarahkan untuk tidak hanya berfokus pada pengajaran di dalam kelas, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap kehadiran dan perkembangan psikososial siswa. Jika ditemukan indikasi siswa mengalami tekanan ekonomi, sosial, atau keluarga yang dapat memicu putus sekolah, pihak sekolah wajib melakukan pelaporan dini dan berkoordinasi dengan pengawas serta koordinator wilayah.

Sebagai bentuk konkret dari implementasi strategi, Dinas Pendidikan menyediakan jalur pendidikan alternatif melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM ini dirancang untuk memberikan pendidikan nonformal yang fleksibel dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran. Program ini sangat membantu anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah tetapi masih ingin memperoleh ijazah setara SD, SMP, atau SMA. Bahkan anak-anak yang sudah menikah di usia muda tetap dapat mengikuti pembelajaran di PKBM selama mereka masih masuk dalam kategori

usia sekolah. Pembelajaran di PKBM dapat dilakukan pagi, siang, sore, bahkan malam, tergantung pada kondisi peserta didik. Fleksibilitas ini menjadikan PKBM sebagai salah satu instrumen penting dalam menjangkau kelompok marginal pendidikan yang tidak terakomodasi oleh sistem sekolah formal.

Di samping itu, implementasi strategi juga mencakup pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin. Bantuan ini tidak hanya bersifat materil, tetapi juga menjadi bentuk afirmasi pemerintah dalam menjaga motivasi siswa untuk terus melanjutkan pendidikan. Bantuan pendidikan menjadi semacam jaring pengaman sosial agar anak-anak dari keluarga yang rentan secara ekonomi tidak perlu meninggalkan sekolah demi membantu orang tua bekerja atau karena keterbatasan biaya.

Untuk mengkoordinasikan berbagai program ini, Dinas Pendidikan menugaskan tim khusus yang bertugas melakukan pemantauan, pendampingan, dan evaluasi program secara berkala. Tim ini terdiri dari pejabat struktural maupun tenaga teknis di bidang pendidikan. Salah satu peran penting tim ini adalah memastikan bahwa setiap laporan dari lapangan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dalam praktiknya, pelaksanaan strategi ini mengikuti pola koordinasi yang berjenjang, mulai dari sekolah, pengawas, koordinator wilayah, hingga ke tingkat kabupaten. Dengan sistem

ini, laporan mengenai siswa yang terindikasi putus sekolah atau permasalahan lain yang berkaitan dapat segera diproses tanpa harus menunggu proses birokrasi panjang. Pola kerja ini menunjukkan efisiensi dan kepekaan yang tinggi terhadap urgensi masalah.

Implementasi strategi ini juga menunjukkan responsivitas yang tinggi terhadap keragaman geografis dan sosial Kabupaten Gowa. Sebagai wilayah yang memiliki kombinasi antara daerah dataran rendah dan daerah pegunungan, pendekatan yang digunakan tidak bisa disamaratakan. Di beberapa kecamatan yang berlokasi di daerah terpencil, tantangan akses transportasi menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pendidikan menyesuaikan bentuk intervensi, misalnya dengan mengaktifkan sekolah- sekolah satelit, membuka kelas jauh, atau menyiapkan moda transportasi khusus bagi siswa. Semua ini dilakukan agar prinsip inklusi dalam pendidikan benar-benar terwujud, yaitu menjangkau semua tanpa kecuali.

Indikator keberhasilan dari implementasi strategi ini dapat dilihat dari dua hal. Pertama, adanya peningkatan partisipasi pendidikan, yang ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah anak yang kembali bersekolah atau mengikuti pendidikan nonformal. Kedua, adanya penurunan angka anak yang tidak sekolah di beberapa kecamatan yang menjadi fokus intervensi. Kedua indikator ini memperlihatkan bahwa strategi yang dijalankan tidak hanya sekadar

program jangka pendek, tetapi juga berimplikasi pada perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh di tingkat daerah.

Lebih dari itu, implementasi strategi ini juga memperlihatkan sinyalemen bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah bergerak melampaui pendekatan administratif semata. Dinas berperan sebagai fasilitator dan katalisator perubahan sosial di bidang pendidikan. Strategi yang diterapkan tidak hanya menjawab pertanyaan "berapa banyak anak yang kembali bersekolah," tetapi juga "bagaimana mereka tetap bertahan dan menyelesaikan pendidikan mereka." Dengan demikian, keberhasilan implementasi bukan hanya dinilai dari angka statistik, tetapi juga dari proses sosial yang menyertainya yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, tumbuhnya solidaritas sosial dalam mendorong anak-anak bersekolah, serta hadirnya pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang responsif dan inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi yang dirancang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam upaya menanggulangi anak putus sekolah telah berjalan cukup efektif dan menyeluruh. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Febriyanty (2021) yang mengemukakan bahwa terkait indikator implementasi strategi yang menunjukkan sistem kekeluargaan yang harmonis di Disdikpora terbukti efektif dalam memotivasi penanganan angka putus sekolah. Selain itu, 124

alokasi 30 % dana APBD, dengan tambahan dukungan dari APBN dan pihak swasta, memberikan dampak positif bagi pelajar di Karawang, yang kini menikmati peningkatan durasi belajar. Strategi ini tidak hanya menekankan pada tindakan langsung di lapangan, seperti penyisiran dan pendataan anak yang tidak sekolah, tetapi juga mencakup pendekatan preventif melalui pemberian beasiswa dan penguatan peran satuan pendidikan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, sekolah, hingga masyarakat lokal, menunjukkan adanya sinergi lintas sektor yang mendukung keberhasilan program. Meskipun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah kendala, seperti belum optimalnya sistem pendataan, ketidaksesuaian data administratif, rendahnya motivasi anak untuk kembali ke sekolah, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan, Dinas Pendidikan tetap menunjukkan komitmen kuat dalam mengupayakan solusi. Pendekatan adaptif seperti pemanfaatan pendidikan nonformal (PKBM) bagi anak yang menikah muda atau tidak lagi cocok dengan sistem formal, menjadi cerminan fleksibilitas dalam strategi implementasi. Temuan ini memperkuat bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh rancangan program, tetapi juga oleh kemampuan responsif dalam menghadapi tantangan lapangan.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian merupakan tahap krusial dalam siklus manajemen strategi, termasuk dalam konteks penanggulangan anak putus sekolah yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Tahap ini menjadi jembatan penting antara perencanaan strategi dan hasil implementasinya di lapangan. Evaluasi berfungsi untuk mengukur efektivitas strategi yang dijalankan, sementara pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa strategi tetap berjalan pada jalur yang benar, terukur, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan para pejabat dan pemangku kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa proses evaluasi tidak dilakukan secara statis atau terikat oleh waktu tertentu. Sebaliknya, evaluasi bersifat kontinu, fleksibel, dan responsif. Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, misalnya, menjelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan melalui laporan yang berasal dari masyarakat dan pengawas pendidikan di seluruh kecamatan. Laporan tersebut menjadi alat deteksi dini atas munculnya persoalan pendidikan, termasuk keberadaan anak-anak yang tidak lagi bersekolah atau kendala lain dalam proses peningkatan mutu sekolah. Evaluasi ini bersifat berkelanjutan dan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan, tidak terpaku pada jadwal atau agenda formal semata.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF menyampaikan bahwa evaluasi juga bersifat kuantitatif, yaitu dengan membandingkan data sebelum dan sesudah program dijalankan. Data awal biasanya mencakup jumlah anak yang putus sekolah maupun yang tidak bersekolah sama sekali. Setelah program dijalankan, dilakukan pengukuran ulang untuk melihat apakah ada peningkatan jumlah anak yang kembali ke sekolah atau menyelesaikan pendidikannya. Jika angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan, maka program dianggap berhasil. Sebaliknya, jika tidak terdapat perubahan yang berarti, maka program perlu dievaluasi ulang dan disesuaikan.

Sementara itu, dari sisi pendidikan nonformal, evaluasi dilakukan melalui forum rutin seperti "pertemuan kornbel" yang dilakukan setiap bulan. Dalam forum ini, jumlah peserta didik dicatat dan dibandingkan secara periodik. Jika terjadi peningkatan peserta, maka program dinilai berjalan efektif. Namun, terdapat hambatan berupa ketidaksesuaian data kependudukan, misalnya anak-anak yang masih tercatat dalam Kartu Keluarga padahal telah pindah, sehingga mempengaruhi akurasi data evaluasi. Kendala ini menunjukkan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam keberhasilan evaluasi, yang memerlukan koordinasi lintas instansi, terutama dengan instansi pencatatan sipil dan pemerintah desa.

Evaluasi tidak hanya sebatas pada pelaporan dan pencatatan data, tetapi juga mencakup aspek responsivitas terhadap situasi yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang lain, setiap laporan dari warga atau sekolah akan segera ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pengendalian yang cepat dan efisien. Dengan kata lain, evaluasi tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan dinamis. Proses evaluasi juga menjadi dasar utama bagi pengambilan kebijakan lebih lanjut, terutama dalam menentukan wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus.

Pengendalian strategi juga mencakup tindakan korektif apabila program atau strategi yang dijalankan tidak menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan, apabila tidak terjadi peningkatan jumlah anak yang kembali bersekolah, maka hal tersebut dijadikan indikator bahwa strategi belum efektif. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi ulang, mengidentifikasi kekurangan program, dan melaksanakan edukasi langsung kepada masyarakat. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, sehingga hambatan sosial dan kultural yang menyebabkan anak tidak sekolah dapat diminimalkan.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pendidikan Nonformal menjelaskan bahwa pengendalian strategi dilakukan hingga ke level

paling bawah, yakni RT dan RW, sebagai upaya menjangkau anak-anak yang tidak bisa kembali ke sekolah formal. Dalam kondisi ini, anak-anak diarahkan ke jalur pendidikan nonformal seperti PKBM, yang menawarkan fleksibilitas waktu dan metode pembelajaran. Bahkan, untuk daerah terpencil, diterapkan sistem pembelajaran daring dengan jadwal yang disesuaikan. Contohnya adalah PKBM dari Manuju yang membuka kelas di Pattallassang dengan frekuensi belajar tiga kali seminggu dan menggunakan grup komunikasi sebagai media koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tidak bersifat satu arah, tetapi adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat.

Selain pendekatan struktural dan administratif, pengendalian strategi juga mencakup dimensi kultural dan motivasional. Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik menegaskan bahwa keberhasilan strategi juga didukung oleh soliditas kerja sama antara semua pihak, mulai dari tingkat terbawah hingga pusat. Keberadaan guru PPPK menjadi penguat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, sebagai bentuk pengendalian yang bersifat insentif, Dinas Pendidikan memberikan penghargaan kepada guru-guru berprestasi. Pemberian reward ini tidak hanya memotivasi guru untuk berkontribusi lebih maksimal, tetapi juga menciptakan budaya apresiasi dalam lingkungan kerja pendidikan di Kabupaten Gowa.

Dari perspektif masyarakat, respons pemerintah terhadap ketidakefektifan strategi juga dianggap cukup adaptif. Seorang informan masyarakat menyatakan bahwa jika suatu pendekatan dianggap tidak berhasil, maka pemerintah akan menggantinya dengan pendekatan yang lebih praktis. Misalnya, pendekatan yang semula bersifat teoretis mulai digeser ke pelatihan keterampilan. Pendekatan praktis ini dinilai lebih aplikatif dan menarik bagi anak-anak yang enggan mengikuti pendidikan formal. Dengan demikian, pengendalian strategi juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membaca kebutuhan masyarakat secara kontekstual.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah membangun sistem evaluasi dan pengendalian strategi yang cukup komprehensif. Evaluasi dilakukan secara berlapis, baik melalui laporan, pengumpulan data kuantitatif, maupun pertemuan koordinatif. Sementara pengendalian dilakukan melalui respons cepat, perbaikan kebijakan, edukasi masyarakat, serta penyediaan jalur pendidikan alternatif. Kombinasi evaluasi yang berbasis data dan pengendalian yang adaptif menunjukkan bahwa strategi penanggulangan anak putus sekolah tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel, responsif, dan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.

Lebih jauh, keberhasilan dalam mengelola proses evaluasi dan pengendalian juga menjadi indikator bahwa Dinas Pendidikan

Kabupaten Gowa tidak hanya menjalankan strategi sebagai agenda formal, tetapi sebagai upaya transformatif dalam membentuk sistem pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Tantangan seperti ketidaksesuaian data dan minimnya kesadaran masyarakat memang masih ada, namun dengan pola evaluasi dan pengendalian yang sistemik dan dinamis, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan pengendalian strategi merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan program penanggulangan anak putus sekolah di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan penggabungan tabel progres sinkronisasi PKBM se- Kabupaten Gowa, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa terbukti efektif dalam mengatasi masalah anak putus sekolah, terlihat dari tingginya jumlah peserta didik di beberapa PKBM, seperti Pkbn Minasanta (1.045 Pd), Pkbn Megah Buana Mandiri (648 Pd), Dan Pkbn Muhammad Aqil (516 PD). Keberadaan PKBM yang merata di seluruh kecamatan, termasuk wilayah terpencil, serta tenaga pendidik yang memadai, menunjukkan keberhasilan strategi pemerataan akses pendidikan. Monitoring berkala dan pembaruan data juga menandakan bahwa sistem pengawasan berjalan aktif. Dengan demikian, program Dinas Pendidikan telah berhasil memberikan solusi alternatif pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah dan mendukung akses pendidikan yang inklusif dan

berkelanjutan. Berdasarkan penggabungan tabel progres sinkronisasi PKBM se-Kabupaten Gowa, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa terbukti efektif dalam mengatasi masalah anak putus sekolah, terlihat dari tingginya jumlah peserta didik di beberapa PKBM, seperti Pkbm Minasanta (1.045 Pd), Pkbm Megah Buana Mandiri (648 Pd), Dan Pkbm Muhammad Aqil (516 Pd). Keberadaan PKBM yang merata di seluruh kecamatan, termasuk wilayah terpencil, serta tenaga pendidik yang memadai, menunjukkan keberhasilan strategi pemerataan akses pendidikan. Monitoring berkala dan pembaruan data juga menandakan bahwa sistem pengawasan berjalan aktif. Dengan demikian, program Dinas Pendidikan telah berhasil membenarkan solusi alternatif pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah dan mendukung akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah berhasil mengimplementasikan program-program pendidikan nonformal melalui PKBM yang efektif dalam menanggulangi permasalahan anak putus sekolah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah peserta didik di berbagai PKBM yang tersebar di seluruh kecamatan, termasuk wilayah terpencil. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistriani (2021) mengemukakan bahwa pemerintah dinas pendidikan telah melakukan evaluasi setiap program, dimana program tersebut

teralisasi dengan tepat baik itu dari program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) serta alternatif lain seperti penyediaan paket A dan Paket B serta sekolah marginal bagia daerah yang sulit agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara rutin melalui laporan masyarakat dan pengawas pendidikan serta analisis data sebelum dan sesudah program dilaksanakan menunjukkan bahwa program ini efektif, meskipun terdapat tantangan dalam akurasi data dan pencatatan peserta didik. Dinas Pendidikan juga menunjukkan respons cepat terhadap kendala yang ada dengan melakukan perbaikan strategi, termasuk pendekatan lebih mendalam di tingkat lokal, pendidikan nonformal, serta penggunaan pembelajaran daring untuk mengatasi keterbatasan akses di daerah terpencil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi penanggulangan anak putus sekolah di Kabupaten Gowa terbukti cukup efektif dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan pendidikan. Manajemen strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk mengatasi masalah pendidikan, khususnya angka anak putus sekolah, meliputi empat indikator utama yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian.

Pengamatan Lingkungan, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi akses pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendataan anak putus sekolah secara rutin dan pemetaan wilayah rawan pendidikan, seperti Kecamatan Parangloe dan Bungaya. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap faktor penyebab seperti kondisi ekonomi, budaya lokal, serta minimnya infrastruktur. Namun, keterbatasan masih terlihat pada belum meratanya cakupan analisis lingkungan, terutama di daerah yang sangat terpencil.

Perumusan Strategi, yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Strategi yang disusun mencakup pemberian bantuan pendidikan, pembangunan unit sekolah baru (USB), serta penyediaan pendidikan alternatif melalui Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM). Strategi ini dinilai cukup tepat sasaran karena diarahkan kepada kelompok rentan dan daerah yang paling terdampak. Meskipun demikian, efektivitas masih terkendala karena hanya sebagian kecil dari penerima beasiswa yang mampu menyelesaikan pendidikannya, dan beberapa USB di wilayah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas penunjang.

Selanjutnya, indikator Implementasi Strategi, Dinas Pendidikan melaksanakan program-program tersebut berjalan cukup efektif dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial. Program seperti sosialisasi pentingnya pendidikan, pendampingan keluarga miskin, dan penyediaan transportasi pendidikan menjadi bagian dari pelaksanaan strategi ini. Beberapa keberhasilan tercapai, seperti berfungsinya PKBM dan meningkatnya kesadaran di sebagian masyarakat. Namun, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia pelaksana di lapangan serta rendahnya antusiasme masyarakat terhadap program-program tersebut, khususnya di daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Evaluasi dan Pengendalian, yang berperan penting dalam memastikan strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah membangun sistem evaluasi dan pengendalian strategi yang cukup komprehensif. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah berhasil

mengimplementasikan program-program pendidikan nonformal melalui PKBM yang efektif dalam menanggulangi permasalahan anak putus sekolah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah peserta didik di berbagai PKBM yang tersebar di seluruh kecamatan, termasuk wilayah terpencil. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara rutin melalui laporan masyarakat dan pengawas pendidikan serta analisis data sebelum dan sesudah program dilaksanakan menunjukkan bahwa program ini efektif, meskipun terdapat tantangan dalam akurasi data dan pencatatan peserta didik.

Secara keseluruhan, manajemen strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah mencakup seluruh indikator penting dan menunjukkan progres dalam mengatasi permasalahan pendidikan, terutama dalam menurunkan angka anak putus sekolah. Namun, ketercapaian dari masing-masing indikator masih memerlukan penguatan dalam hal integrasi kebijakan, pelibatan masyarakat, pendataan yang lebih akurat, dan evaluasi yang lebih menyeluruh serta partisipatif. Perlu upaya lebih lanjut untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat:

Masyarakat, terutama orang tua, diharapkan lebih aktif mendukung keberlangsungan pendidikan anak dengan memperkuat

peran keluarga dalam membina dan memotivasi anak untuk tetap bersekolah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai jalan masa depan perlu terus ditanamkan, terutama di wilayah rawan putus sekolah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan anak-anak yang tidak bersekolah kepada pihak sekolah atau pemerintah desa agar dapat segera ditindaklanjuti.

2. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa:

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, perlu meningkatkan intensitas pendataan dan pemetaan wilayah yang rawan anak putus sekolah melalui kolaborasi dengan pihak sekolah, pemerintah desa, dan lembaga sosial. Program bantuan pendidikan seperti beasiswa, penyediaan perlengkapan sekolah, serta transportasi bagi siswa di daerah terpencil juga perlu ditingkatkan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pendidikan di lapangan sangat penting agar proses identifikasi dan penanganan kasus anak putus sekolah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti:

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi anak putus sekolah, serta mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriaji, M., & Rahmayanti, A. (2023). Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad*, 5(2), 42–52. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.5.2.57>
- Akdon. (2006). *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta.
- Asmiati, A., Sumardi, L., Ismail, M., & Alqadri, B. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Melanjutkan Studi Anak Pada Masyarakat Nelayan di Desa Seruni Mumbul Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 786–793. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.645>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gowa. (2022). *Laporan Survei Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2022*. Gowa: Bappeda Gowa.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. Jakarta: BPS.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: Sage Publications.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*.
- Cohen, J. and Uphoff, N. (1977). *Rural Development Participation Concept and Measure for Project Design Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/37882>
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. (2023). *Laporan Evaluasi Program Pendidikan di Kabupaten Gowa Tahun 2023*. Gowa: Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
- Dinas Sosial Kabupaten Gowa. (2023). *Data Kemiskinan dan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Gowa Tahun 2023*. Gowa: Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

- Djumhur, & Surya, M. (1985). Psikologi Pendidikan. Bandung CV Ilmu.
- Febriyanty, R. (2021). Manajemen Strategi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 391–402. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5792249>
- Febriyanty, R. (2021). Manajemen Strategi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 391–402. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5792249>.
- Haldane, V., Chuah, F. L. H., Srivastava, A., Singh, S. R., Koh, G. C. H., Seng, C. K., & Legido-Quigley, H. (2019). Community participation in health services development, implementation, and evaluation: A systematic review of empowerment, health, community, and process outcomes. *PLOS ONE*, 14(5), e0216112. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216112>
- Hidayat, M. T. N., Abdurrahman, A. I., & Suseno, A. (2024). Strategi Sosialisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Pelajar SMP di Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 665–689.
- Holil, S. (1980). Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.
- Hunger, J. David & Thomas L. Wheelen, 2003 Manajemen Strategi edisi II. Yogyakarta
- Imam Sucahyo, Andhi Nur, & Deddy Iroe. (2024). Strategi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo Dalam Mengatasi Permasalahan Anak Putus Sekolah. *Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 11(1), 6–13. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v11i1.1147>
- Isbandi, R. A. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Fisip UI Press.
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1399–1404. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3441>
- Kusumaningrum, H., Fithriyah, N., Nugraha, C. G., & Ghafur, M. F. R. (2024). Peran Lingkungan Eksternal yang ada di Lembaga Pendidikan (Kajian Studi Literatur Manajemen Strategik). *Jurnal Nuansa*:

Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 2(3), 3024–8388.
<https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.1077>

Morin benjamin. (2018). Strategi dinas pendidikan dalam meminimalisir anak putus sekolah di kota Bitung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Mudyahardjo, R. (2001). *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mulyasa. (2013). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (2000). *Didaktik Asas-asas Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Hadari. (2005). *Strategic Management of Non-Profit Organizations in Government Sector with Illustrations in the Education Sector*. Edition 5. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>

Rumberger, R. W. (2001). *Why Students Drop Out of School and What Can Be Done*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedijarto. (1993). *Menuju Pendidikan yang Relevan dan Bermutu*. Jakarta: Gramedia.

Sudjana, N. (2000). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sulistriani. (2021). Strategi Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. *Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 1–108. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/7078>

Suwarsono. (2013). *Strategi pemerintahan : Manajemen organisasi publik (Cet 1)*. Jakarta Erlangga.

- Tardian, A. (2019). Manajemen Strategik Mutu Sekolah: Studi Kasus di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto. *Jurnal Kependidikan*, 7(2), 192–203. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.2989>
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Udhiya, L., Ramdani, R., & Gumilar, G. G. (2024). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa. *Community Development Journal*, 5(3), 5434–5437.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UNESCO. (2015). *Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, DC: The World Bank.
- Yuliah, E., 2020. Implementasi Kebijakan Pendidikan. *J. At-Tadbir Media Huk. Dan Pendidik*. 30, 129–153

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Makassar



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sulawesi Selatan No. 229 Tj. Bontomatene 90111 Makassar 90121 e-mail: info@umh.ac.id

Nomor : 6496/05/C.4-VIII/III/1446/2025

12 March 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

12 Ramadhan 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0288/FSP/A.5-VIII/III/1446/2025 tanggal 12 Maret 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AGUS MAULANA

No. Stambuk : 10561 1129419

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Manajemen Strategi Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Maret 2025 s/d 14 Mei 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaerom

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LPSM,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Hos Cokroaminoto No 1 Gedung Mal Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminata Kab. Gowa 92111.
 Website: gowa.go.id

Nomor : 500.16.74/284/PENELITIAN/DPMPTSP-GOWA
 Lampiran :
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 5991/S.01/PTSP/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Izin Penelitian.
 Dengan ini disampaikan kepada saudara/i bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : **AGUS MAULANA**
 Tempat/Tanggal Lahir : Rappolemba / 11 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nomor Pokok : 105611129419
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Toppangjeng, Dusun Bulup/Rong, Desa Rappolemba

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi / Tesis / Disertasi / Lembaga di wilayah/Tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Manajemen Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Gowa"

Selama : 14 Maret 2025 s/d 1 Mei 2025

Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bapak/Ibu Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan diSungguminata, pada tanggal :

a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA



H. HORA DETIAWAN ARBAQ S. Sos. M.Si
 Np. 19721008-198303-1-003

- Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
 2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Yosudarmadana Raya No. 11, 10 Pandan-pandan Kudo, P.O. 92114 Sungguminasa

IZIN PENELITIAN
 Nomor : 100/3.4.0/2104/ED/000

Dasar : Surat Kepala Dinas Pemasaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Duta Kabupaten Gowa Nomor : 200/16.7.4/2144-PENELITIAN/DPM-PTSP/GOWA Tanggal : 28 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Penelitian, maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

MENGIZINKAN

Kepala : Nama : AGUS MAUTANA
 Tempat/Tgl Lahir : Rappolemba : 11 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nomor Pukak : 000611129419
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan Lahirnya : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Tappalang, Dusun Bulapong Desa Rappolemba

Untuk : Melakukan Penelitian di Dinas Pendidikan Kab. Gowa dalam rangka penyusunan Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Judul Penelitian : "MANAJEMEN STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGATASI MASALAH PENDIDIKAN DI KABUPATEN GOWA"

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus melapor pada Kepala Dinas yang bersangkutan
2. Tidak Mengganggu proses Kegiatan di Lokasi Penelitian
3. Harus mematuhi tata tertib dan peraturan di Sekolah yang berlaku
4. Hasil penelitian 1 (satu) semester dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa.

Dipastikan surat izin penelitian ini diberikan secara dipisahkan sebagai surat menyela.

Sungguminasa, 21 April 2023





Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
TAUFIQ MURSADET
 Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP : 197207011998051008

Tembusan :
 1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
 2. Peninggal

Disetujui :

- Pada 08 Mei 2023 telah diteliti pada saat 1 Tahun ini diteliti dengan hasil sebagai berikut:
 - 1. Hasil penelitian 1 (satu) semester dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa.
 - 2. Hasil penelitian 1 (satu) semester dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa.

Lampira 4 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 & 2. Dokumentasi Wawancara : Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Sumarni, S.Pd)



Gambar 3 & 4. Dokumentasi Wawancara : Kepala Bidang Pembinaan Dan Pendidikan Non Formal (Sumarni, S.Pd)



Gambar 5 & 6. Dokumentasi Wawancara : Kepala Seksi Pendataan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF (Sumarni, S.Pd)



Gambar 7. Dokumentasi Wawancara : Masyarakat (Ani Nurhayati)



Gambar 8. Dokumentasi Wawancara : Masyarakat (Nur Rahmah)



Gambar 7. Dokumentasi Wawancara :
Mayarakat (Murniati Tanjung)



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“MANAJEMEN STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM MENGATASI MASALAH PENDIDIKAN DI KABUPATEN GOWA”

Data Demografi Responden

1. Nama (opsional atau inisial): _____
2. Usia: _____
3. Jenis Kelamin: _____
4. Pekerjaan: _____
5. Kategori responden:

☐ Masyarakat

☐ Pegawai Dinas Pendidikan

INFORMAN: STAF DINAS PENDIDIKAN

Tujuan Umum Wawancara: Menggali informasi tentang bagaimana manajemen strategi diterapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam menangani masalah anak putus sekolah, dengan pendekatan teori manajemen strategi: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian.

A. Pengamatan Lingkungan

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan anak-anak putus sekolah di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana Dinas Pendidikan mengidentifikasi masalah tersebut?

B. Perumusan Strategi

1. Apa strategi utama yang dirancang untuk menangani masalah putus sekolah?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perumusan strategi tersebut?

C. Implementasi Strategi

1. Program atau kebijakan apa yang telah dijalankan untuk mengurangi angka putus sekolah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi selama pelaksanaan strategi di lapangan?

D. Evaluasi dan Pengendalian

1. Bagaimana Dinas mengevaluasi keberhasilan program-program yang dijalankan?
2. Apa langkah perbaikan yang dilakukan jika strategi tidak berjalan efektif?

INFORMAN: MASYARAKAT

Tujuan Umum Wawancara: Menggali persepsi masyarakat terhadap penyebab anak putus sekolah serta tanggapan mereka terhadap program pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

A. Faktor Penyebab

1. Menurut Anda, apa alasan utama anak-anak putus sekolah di sini?
2. Apakah kemiskinan, jarak sekolah, atau budaya ikut memengaruhi keputusan anak berhenti sekolah?

B. Respon terhadap Program Pemerintah

1. Apakah Anda mengetahui adanya bantuan atau program pemerintah untuk mencegah putus sekolah?
2. Apakah menurut Anda program tersebut sudah membantu anak-anak tetap bersekolah?

C. Keterlibatan Masyarakat

1. Apakah masyarakat sekitar Anda ikut mendukung anak-anak untuk tetap sekolah?
2. Apakah Anda atau komunitas pernah dilibatkan dalam diskusi atau program pendidikan?



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini,

Nama : Agus Maulana
Nim : 105611129419
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	5 %	15 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 23 Juli 2025
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I AGUS MAULANA 105611129419

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

2%

docplayer.info
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On



Exclude bibliography 2%

BAB II Agus Maulana 105611129419

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

repository.unbara.ac.id
Internet Source

5%

elibrary.unikom.ac.id
Internet Source

4%

jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id
Internet Source

3%

jurnal.fisipolupgriplk.ac.id
Internet Source

3%

Submitted to IAIN Batusangkar
Student Paper

2%

ojs-al-idara-balad.web.id
Internet Source

2%

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Makassar
Student Paper

2%

id.123dok.com
Internet Source

2%

digilib.unila.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

BAB III Agus Maulana 105611129419

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ repo.stkippgri-bkl.ac.id
Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On



Additional matches

+ 2%

BAB IV AGUS MAULANA 105611129419

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

gowakab.go.id

Internet Source

3%

2

esakip.gowakab.go.id

Internet Source

2%

3

123dok.com

Internet Source

2%



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

BAB V Agus Maulana 105611129419

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Riana ., Rengkung, Martha Mareyke Sendow, Agnes Estephina Loho. "STRATEGI PENGEMBANGAN PADI ORGANIK DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (DEVELOPMENT STRATEGIES OF ORGANIC RICE IN SOUTHEAST MINAHASA DISTRICT", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2021

Publication

2%

2

journal.upgris.ac.id

Internet Source

2%

3

porospro.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

+ 2%

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Agus Maulana, lahir pada 11 February 2001 di Dusun Lembaya, Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Aku dibesarkan dalam lingkungan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, di mana setiap rupiah dihitung, dan setiap harapan dipertemukan dengan kenyataan yang sering kali tidak memberi kemudahan. Orang tuaku tinggal di Desa.

Mereka menjalani hidup seadanya, bekerja keras agar dapur tetap menyala dan anak-anak mereka bisa tetap sekolah. Ketika aku memutuskan untuk merantau ke kota demi pendidikan, itu bukan karena semuanya sudah siap. Justru karena banyak hal belum pasti, aku tahu bahwa bertahan dan belajar adalah satu-satunya jalan.

Aku menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Sepanjang perjalanan kuliah yang sudah menyentuh semester 12 ada banyak pengalaman dan cara bertahan hidup di kota besar yang kudapat, mulai dari menjadi pekerja serabutan, agen Bank, hingga marketing kaos yang hasilnya cukup untuk kebutuhan makan. Tak ada yang mudah tapi menyerah juga bukan pilihan.

Di sela perjuangan ekonomi, aku aktif di berbagai organisasi. Di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), aku pernah dipercaya sebagai Ketua Bidang Organisasi Dan kini telah Demisioner. Aku juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi Dan Politik di salah satu organisasi Ekstra Kampus, Organisasi Mahasiswa Dan Pemuda Intelektual Sulawesi Selatan (OMPI). Dari organisasi, aku belajar bahwa berpikir tidak cukup bila

tidak diiringi dengan keberanian untuk bertindak. Selain itu Aku juga pernah bergabung sebagai Tim Peneliti Lapangan di Litbang Kompas. Dari pengalaman itu, aku menyadari bahwa memahami realitas masyarakat bukan hanya soal teori di ruang kelas, tapi tentang menyelami fakta di lapangan dan mendengar suara yang sering kali tidak terdengar oleh kebijakan.

Di tengah semua itu, aku ditemani oleh seseorang yang selalu memberiku alasan untuk tetap bertahan dan terus melangkah dalam proses pertobatan akademik ini, ia adalah Ira Wulandari, ia sederhana, anggun, dan kadang keras kepala, tapi kehadirannya berarti, dan aku mencintainya, dia adalah teman berbagi lelah, berbagi masalah, dan melewati masa sulit.

Viktor Frankl, dalam bukunya —Man's Search For Meaning, menulis: "Those who have a 'why' to live, can bear with almost any 'how'". Mereka yang memiliki alasan untuk hidup, mampu menanggung penderitaan seperti apa pun. "

Aku punya alasan itu. Dan skripsi ini adalah bagian kecil dari proses mencarinya. Ia bukan sekedar kewajiban akademik, tapi jejak dari perjuangan diam-diam yang membawaku dari dusun ke kota, dari keraguan ke pengetahuan. Aku menulis riwayat ini bukan untuk dikagumi, tapi sebagai bukti bahwa aku pernah bertahan dan terus belajar untuk menjadi manusia yang tidak menyerah.